

hadap kewajibannya ia mengambil sikap terhadap Yang Mutlak: ia mengiyakan tuntutan mutlak yang bernilai mutlak. Dan itu berarti, tanpa menyadarinya secara refleksi, ia betul2 tant terhadap kehendak Allah. Tentang orang itu dapat saja dikatakan apa yang dikatakan tentang orang yang percaya: ia menjawab panggilan Allah, melepaskan diri kedalam tangan Allah, membangun hidupnya atas panggilan Allah.

Dari situ kita harus menarik kesimpulan bahwa seorang atheis pun dapat mempunyai iman dalam arti yang sesungguhnya: dalam melaksanakan kewajibannya ia de facto mengiyakan Yang Mutlak, Allah. Kita perlu membedakan antara iman eksplisit dan iman implisit. Yang pertama terdapat apabila orang mengakui adanya Tuhan dengan sadar. Kita dapat bicara tentang iman implisit, apabila orang mengakui Tuhan tidak dengan sadar, melainkan dalam mengakui dan melaksanakan panggilannya didalam kewajiban moral.

Bagitu pula orang dapat menolak Allah dalam dua arti. Ada yang mengatakan diri atheis karena kata "Allah" tidak ada artinya bagi mereka, atau berasosiasi jelek, karena "Allah" dialaminya sebagai selimut orang beragama untuk mengajir kepentingan mereka sendiri; karena ia dididik anti Allah. Orang itu sebetulnya tidak menolak Allah; ia menolak suatu kepicikan manusia yang diselubungi dengan kertas bungkus "Allah". Seandainya ia bertemu muka dengan Allah ia tentu akan menerimanya dengan gembira. Dalam arti yang sungguh2 orang menolak Allah apabila ia tidak mau mengakuinya dengan menyadari sepenuhnya apa yang ditolakinya. Banyak orang meragukan apakah itu pernah terjadi. Tentu saja, setiap penolakan untuk melakukan apa yang disadari sebagai kewajiban sungguh2, pun menolak Allah.

Maka yang penting bukan pertama2 apakah orang dengan eksplisit mengatakan "aku percaya pada Tuhan yang Mahnesa" melainkan apakah ia terbuka terhadap tuntutan kewajiban dan tanggungjawab. Kalau itu ada, pengakuan yang eksplisit terhadap Allah memang merupakan puncak dan sumber kegabresan kesadaran moral orang itu.

BAGIAN KEDUA

ETIKA NORMATIF

(74) Pendahuluan

Dalam bagian pertama kita telah mengikuti metode fenomenologis: kita memandang apa yang kelihatan, artinya, kita memperhatikan unsur2 yang ternyata terdapat dalam kesadaran moral kita sendiri. Kita tidak berteor tentang kesadaran moral melainkan kita telah berusaha untuk menggambar apa yang ada didalam kesadaran moral. Pernyataan2 yang merumus hasil penandaangan itu tidak kami 'buktikan'; kami tidak mengajukan argumen pro dan kontra. Kami hanya mengatakan: "coba, Saudara memperhatikan sendiri apa yang disadari Saudara, bukankah begitulah isinya?".

Metode fenomenologis dengan sendirinya hanya menyingkir fakta. Tidak menjawab pertanyaan "mengapa demikian", "apakah memang harusnya demikian?" dsb.

Tetapi salah satu "fakta" dalam kesadaran moral yang telah kita gali adalah rasionalitannya. Yaitu bahwa apa yang saya sadari sebagai kewajiban itu sekaligus saya sadari sebagai sesuatu yang bukan ketetapan saya sendiri, melainkan sesuatu yang memang demikian, sesuatu yang akan berlaku bagi setiap orang saja yang berada dalam posisi saya, jadi bukan sesuatu yang ada gendongannya dengan kekhususan diri saya ini. Rasionalita itu menyatakan diri didalam dorongan kesadaran moral sendiri untuk mencari apa yang memang betul. Kita telah melihat bahwa kesadaran moral kita sendiri tidak membenarkan sikap "sudahlah, ini suara betin saya, jangan diganggu-gugat lagi!" Sebelum kita harus mengambil keputusan - atas dasar keinsyafan kita pada saat itu - kita tetap inayaf bahwa kita harus terbuka bagi dialog, teguran, bantahan, harus membiarkan pendapat kita diuji oleh api kritik. Dengan lain kata, kita se-

lalu bertanya: Apa yang sebenarnya mesti saya lakukan sekarang?

Dengan demikian kita berhadapan dengan suatu pertanyaan yang sama sekali baru, yaitu: manakah norma2 moral obyektif? Kesadaran moral sendiri mendesak kita untuk menaeri apa yang obyektif betul, maka kita harus bertanya: Apa yang secara obyektif merupakan kewajiban saya?

Pertanyaan ini tidak lagi dapat dijawab secara fenomenologis belaka. Kita tidak dapat menjawabnya misalnya begini: "Yang harus kau lakukan ialah apa yang kau sadari sebagai kewajibanmu!" Mengapa tidak? Karena kita justru ingin tahu apakah apa yang kita sadari sebagai kewajiban kita itu memang kewajiban kita atau tidak. Misalnya seorang guru dalam ujian penghabisan melihat seorang mahasiswa yang lemah tetapi anak baik, sedang menyontek; kontan ia merasa wajib untuk melaporkan dia itu; tetapi tiba2 timbul pertanyaan padanya: "apakah saya memang wajib untuk melaporkan dia dan dengan demikian menjatuhkannya?"

Jadi kita sekarang mencari jawaban atas pertanyaan: Manakah norma2 dengannya tindakan kita harus sesuai supaya betul dalam arti moral? Satu jawaban langsung dapat kita tolak, yaitu: "bertindaklah selalu menurut norma-norma (hukum adat-istiadat, moral dll.) yang dianggap berlaku dalam lingkungan masyarakatmu!" Pada permulaan kita telah melihat bahwa kesadaran moral mutlak sifatnya: tidak mempersoalkan apa yang sesuai dengan pendapat umum, melainkan apa yang memang betul. Kita justru ingin tahu apakah norma2 yang umum dianggap berlaku memang wajib kita terima. Etika justru ilmu yang membuat kita kritis terhadap kesan semu se-akan2 norma2 masyarakat begitu saja berhak untuk mengikat kita.

Ada pendapat lain yang juga telah kita tolak, yaitu pendapat yang mengatakan bahwa pertanyaan kita diatas tidak mempunyai arti karena - kata mereka - hal kesadaran moral adalah hal perasaan (emotivisme) atau keputusan (preskriptivisme) belaka (lih. No. 36-38).

Akan tetapi, bagaimanakah cara untuk menjawab pertanyaan kita diatas? Jawabannya tidak kita temukan diantara fakta2 dunia yang dapat diamati dan - sebagaimana baru diterangkan - tidak pula diantara 'fakta2' kesadaran kita yang dapat dipandang dengan metode fenomenologis. Sebaliknya, kita tidak lagi mencari suatu fakta, sesuatu yang ada, melainkan sesuatu yang harus ada. Kita bertanya bagaimana seharusnya kita bertindak. Tetapi yang dapat dilihat selalu hanya yang ada, tidak pernah yang harus ada. Untuk mencegah kesulitan itu dan sekaligus menghindari suatu diskusi panjang tentang masalah metode etika (yang masih terus sedang berlangsung) kami akan menggunakan metode yang banyak dipergunakan sekarang (mis. oleh Frankena, C.J. Warnock, Brandt), yaitu metode peninjauan kritis terhadap pendapat2 yang ada. Tegasnya, kami akan membandingkan teori2 tentang norma2 moral dengan apa yang pada umumnya dianggap berlaku sebagai kewajiban. Apabila ada himpunan kewajiban moral (yaitu menurut anggapan umum) yang tidak dapat diterangkan oleh teori yang kita selidiki, sekurang-kurangnya dapat dikatakan bahwa teori itu tidak mencukupi.

Dalam arti tertentu metode ini memang berdasarkan apa yang umumnya dianggap berlaku. Yaitu dalam arti bahwa ukuran untuk menerima atau menolak suatu teori normatif adalah apakah teori itu dapat menerangkan pendapat-pendapat moral yang paling dasar dan umum diterima diमत manusia. Kalau misalnya ada teori normatif yang tidak dapat membenarkan bahwa orang pada umumnya diharapkan berlaku jujur, teori itu akan kami nilai sebagai "tidak mencukupi" atau bahkan "salah". Tetapi perlu diperhatikan bahwa itu secara logis tidak mengandikan bahwa kejujuran pasti merupakan tuntutan moral. Tetap terbuka lah kemungkinan untuk menolak pendapat itu. Kami hanya mengatakan bahwa suatu teori yang sama sekali tidak dapat menerangkan sesuatu yang umumnya dianggap sebagai tuntutan moral, kami anggap tidak mungkin betul. Sekurang-kurangnya suatu teori mesti dapat menerangkan mengapa orang sampai berpendapat bahwa kita harus berlaku jujur.

Jadi metode kita adalah metode kritis negatif: Negatif, karena tidak mengatakan bahwa inilah cara untuk menentukan norma2 moral, melainkan yang kita tentukan hanyalah apa yang tidak merupakan cara yang syah. Kritis, karena kita hadapkan teori2 normatif pada suatu ujian: berhasilkah metode ini untuk menerangkan keyakinan2 moral yang de fakto ada? Memang kalau orangnya ngotot dan mengatakan: saya tak peduli keyakinan2 moral, amat manusia yang paling umum dan paling mendalam, saya mempunyai pendapat lain, ia tidak akan terkesan oleh penilaian kita, tetapi lantas timbul masalah apakah ia

masih membicarakan fenomena yang sama seperti kita, yaitu fenomena kesadaran moral.

Maka sebelum kami mengajukan suatu percobaan sendiri, kami akan memeriksa dulu pendapat2 pokok etika normatif yang sampai sekarang disuarakan.

(75)

I. Peninjauan teori2 normatif pokok

Kita sekarang akan menyelidiki jawaban2 pokok yang telah diterika terhadap pertanyaan: Menurut norma2 manakah kita seharusnya bertindak? Ternyata telah bahwa semua jawaban itu jatuh kedalam salah satu dari dua golongan ini: yang satu disebut deontologis, yang satunya teleologis.

Teori deontologis (dari Yunani: "deon" = yang diharuskan, yang wajib) mengatakan bahwa betul-salahnya suatu tindakan tidak dapat ditentukan dari akibat2 tindakan itu melainkan ada cara bertindak yang begitu saja terlarang, atau begitu saja wajib. Jadi untuk mengetahui apakah kita boleh mengambil mempelam dari pohon tetangga tanpa bertanya lebih dahulu kepadanya, kita jangan bertanya bagaimanakah akibat dari perbuatan itu, melainkan mengambil barang orang lain tanpa izinya begitu saja tidak boleh. Contoh lain: biasanya orang berpendapat bahwa bohong itu tidak boleh, bahkan tidak pernah boleh, pampula kalau saya beruntung daripadanya. Atau: saya selalu harus bertindak adil biarpun mungkin pernah lebih banyak orang beruntung seandainya saya sekali ini melalaikan keadilan.

Sebaliknya teori2 teleologis (dari Yunani: "telos" = tujuan) mengatakan bahwa betul-tidaknyanya tindakan justru tergantung dari akibat2nya: kalau akibatnya baik, saya boleh, barangkali bahkan wajib untuk melakukannya, kalau akibatnya buruk, tidak boleh. Jadi bohong itu kalau untuk melindungi seseorang dari keganasan pembunuh, boleh saja menurut mereka. Atau apakah orang tua wajib menyekolahkan anaknya dapat diputuskan dengan memperhatikan akibat baik dan buruk bagi anak itu dan bagi orangtuanya seandainya anak itu tidak disekolahkan. Tentu saja, dalam teori teleologis segala2nya tergantung dari apa yang dianggap baik dan buruk. Orang yang berpendapat bahwa paling baik itu yang paling menguntungkan dirinya sendiri, akan memberi jawaban lain terhadap pertanyaan: berapa besar seharusnya upah yang wajib saya bayar?, daripada orang yang berpendapat bahwa yang paling baik adalah apa yang membuat sebanyak mungkin orang menjadi bahagia. Kelihatannya bahwa teori2 teleologis membutuhkan suatu teori nilai, yaitu suatu teori tentang apa yang baik dan apa yang buruk bagi manusia (sedangkan teori2 deontologis tidak membutuhkannya karena mengukur tindakan tidak pada akibat baik atau buruknya). Dalam sejarah filsafat pada dasarnya dikemukakan dua pendapat tentang apa yang baik pada dirinya sendiri: yang pertama bahwa itulah rasa nikmat; pendapat ini disebut hedonisme (dari Yunani: "hedone" = nikmat). Yang kedua mengatakan bahwa ada macam2 hal yang baik bagi manusia yaitu apa saja yang membuatnya bahagia; pendapat ini disebut eudemonisme (dari Yunani: "eudaimonia" = kebahagiaan).

Masih ada satu pemisahan yang penting dalam rangka teori2 teleologis, yaitu apakah saya dianggap harus bertindak sesuai dengan yang baik bagi diri saya sendiri saja, atau yang baik bagi sebanyak mungkin orang? Yang pertama adalah pendapat egoisme etis, yang kedua pendapat universalisme etis yang biasanya disebut utilitarianisme (tentu saja, baik egoisme maupun utilitarianisme dapat bersifat hedonis dan eudemonis).

Kami akan mulai dengan membicarakan egoisme.

(76)

I. Egoisme Etis

Pendapat Egoisme moral dapat dirumuskan begini: Bertindaklah sedemikian rupa sehingga engkau mencapai hasil yang paling baik bagimu.

Tentu saja ada banyak kemungkinan bentuk egoisme itu, tergantung dari apa yang dianggap baik (nikmat, perkembangan diri, surga), dan apakah hasil baik itu mau dicapai dalam jangka pendek atau panjang. Tetapi perbedaan-perbedaan itu tidak perlu kita bicarakan lebih lanjut, apalagi beberapa macam egoisme masih akan diperbincangkan secara khusus.

Yang kita tanyakan sekarang ialah bagaimana egoisme etis itu harus dinilai? Pertama-tama kiranya dapat dikatakan bahwa orang yang betul2 hidup

sesuai dengan kepentingannya sendiri yang nyata itu seorang yang matang dan tahu tanggungjawab. Orang itu tidak menurut begitu saja segala macam keinginan, dorongan, nafsu (seperti: mau balas dendam, iri hati, nafsu seks, ingin bermas-malasan dsb.). Melainkan ia mengadakan penilaian dulu tentang apa yang paling cocok untuknya, kemudian bertindak sesuai dengan penilaian itu. Egoisme semacam itu perlu dinilai cukup tinggi secara moral. Bukankah justru kekuatan irasionalitas yang paling mengancam hidup kita dan hidup orang lain, dan bukan usaha untuk bertindak sesuai dengan kepentingan yang nyata? Apalagi dalam bidang sosial, politik nasional maupun internasional kebanyakan perang dan malapetaka adalah akibat dari kemenangan rasa irasional terhadap kepentingan nyata bangsa itu sendiri (begitu Pemerintah orde baru segera menghentikan konfrontasi Indonesia dengan Malaysia, rapu2 karena menyadari bahwa konfrontasi itu lebih2 berupa cetusan nafsu buta dan sebetulnya bertentangan dengan kepentingan Indonesia yang nyata). Jadi jangan kita cepet2 menjatuhkan keputusan bahwa egoisme etis itu mesti asusila.

Dilain pihak kiranya harus diakui pula bahwa egoisme tidak mencakupi. Rupa-rupanya ada kesediaan di sana dituntut dari kita, agar kita mengorbankan kepentingan kita sendiri. Misalnya seorang ibu yang tidak memeri hiburnya sendiri demi anaknya. Atau seorang dokter yang bersedia bekerja didaerah walaupun dapat membuka praktek dikota besar. Atau orang menolak kesempatan kerupai karena merasa wajib untuk bekerja tanpa pamrih bagi masyarakat. Orang yang hanya mencari kepentingannya sendiri tidak sanggup untuk bersikap sungguh2 baik terhadap orang lain, bahkan keadilan hanya dipakail sejuah menguntungkan dia sendiri. Pendak kata: walaupun egoisme tidak pada dirinya sendiri jelek, bahkan menuntut sikap yang matang, namun tidak mencakupi sebagai sikap moral: dari kita juga dituntut, agar memercuahkan kepentingan kita demi orang lain.

Mari kita sekarang melihat dua bentuk khusus egoisme etis.

(77)

2. Hedonisme egois

Hedonisme egois beranggapan bahwa hanya ada satu hal yang pada dirinya sendiri baik bagi manusia, yaitu rasa nikmat. Maka kehidup dagra hedonisme egois adalah: Bertindaklah sedemikian rupa sehingga engkau menapai jumlah nikmat yang paling besar, atau: sehingga engkau menghindari segala macam rasa sakit sedapat-depatnya.

Pandangan ini dalam filsafat Yunani dikemukakan oleh Aristipp dan oleh mazhab Epikuros. Pada zaman ini hedonisme egois ini ("carilah nikmat sebanyak mungkin") biasanya diajukan dengan alasan bahwa, bagaimanapun juga, manusia akhirnya dengan segala usaha toh hanya memeri yang satu ini: rasa nikmat. Demikian Sigmund Freud, tetapi juga Moritz Schlick (pendiri lingkungan Wiena", 1882-1936). Menurut mereka, orang manpu diri kalau ia mengira bahwa ia mencari keadilan dan kebenaran atau mau membuat baik pada orang lain: sebetulnya ia hanya mencari nilainya saja. Jadi menurut mereka, didalam segala usaha manusia akhirnya hanya mengejar kenikmatan jamanahnya saja. Pendapat ini disebut hedonisme psikologis.

Hedonisme psikologis itu bukan suatu teori etika melainkan teori tentang manusia. Tetapi kalau teori2 itu betul, tentu saja tidak masuk akal orang mencari yang lain kecuali nikmat, jadi hedonisme etis pun harus diterima. Maka perlu hedonisme psikologis kita periksa dulu.

Tidak perlu disangkal bahwa dorongan untuk memeri nikmat sangat kuat pada kita, dan bahwa kita mungkin sekali selalu berusaha untuk menegah rasa sakit. Tetapi apakah itu berarti bahwa segala tindakan diambil hanya untuk menegah rasa sakit saja? Apakah itu berarti bahwa kita selalu hanya bertujuan untuk memenuhkan dorongan untuk menepai nikmat?

Aristoteles sudah menunjukkan bahwa kita melakukan banyak usaha yang kalau berhasil membawa nikmat atau kesenangan, tetapi tidak demi kesenangan itu. Kalau kita menyekani posta seseorang untuk membuat dia gembira, dan kita berhasil, kitapun akan merasa gembira, tetapi itu tidak berarti bahwa kita mengadakan posta itu hanya untuk menjadi gembira sendiri!

Mengenai kegembiraan para psikolog berpendapat bahwa justru tidak dapat tercapai kalau kita memerinya: kegembiraan itu sesuatu yang menyertai usaha untuk menepai sesuatu yang lain. Kalau itu berlaku untuk kegembiraan, apalagi untuk nikmat jamaniah. Ada banyak kegiatan yang hanya secara dibunt-bunt dapat dikatakan kita lakukan untuk memeri nikmat: berjalan-jalan; memeri:

pengetahuan, kekuasaan, kebebasan, hormat; mengusahakan persahabatan; pekerjaan seorang seniman dst. Semua kegiatan itu kita lakukan bukan untuk mencari nikmat melainkan karena kegiatan itu sendiri menarik.

Lebih dari itu, kita berani menderita bagi orang yang kita cintai atau yang menjadi tanggung jawab kita, dan tidaklah untuk mencari nikmat. Maka dari itu, hedonisme psikologis tidak dapat dipertahankan.

Sedangkan melawan hedonisme etis dapat diajukan keberatan yang sama seperti melawan egoisme pada umumnya: bukankah kita kadang2 wajib mengorbankan kesenangan kita? Bukankah contoh2 melawan hedonisme psikologis tidak juga kita perhatikan? Jadi hedonisme etis tidak dapat dipertahankan karena kita memang sering merasa wajib untuk melakukan sesuatu yang justru menaubah unsur2 yang tidak enak pada kita atau yang nencegah kecendangn kita untuk mencari nikmat.

Tetapi disinipun perlu suatu peringatan: mencari kegembiraan, kesenangan dan nikmat tidak jelek pada dirinya sendiri. Sebaliknya, kalau kita tidak merugikan kita sendiri atau orang lain, kalau kita tidak melalaikan suatu kewajiban, segala kegembiraan, kesenangan dan nikmat yang ditawarkan kepada kita boleh saja kita petik. Orang yang selalu menentang segala rasa nikmat, tak pernah dapat bersantai dan mudah menjadi keras dan picik sifatnya. Asal saja kita ketahui bahwa memang ada hal2 yang jauh lebih penting daripada kenikmatan kita sendiri, kenikmatan itu boleh saja kita terima.

(78) Rangkuman:

Isilah-istilah:

Kaidah teori etika teleologis: suatu tindakan itu betul (dalam arti moral) kalau akibatnya baik (dalam arti bukan moral), salah (dalam arti moral) kalau akibatnya buruk (dalam arti bukan moral).

Kaidah egoisme etis: Bertindaklah sedemikian rupa sehingga engkau mencapai hasil yang paling baik bagimu.

Hedonisme egois: Egoisme dengan teori nilai hedonis, yaitu bahwa yang baik pada dirinya sendiri hanyalah rasa nikmat.

Kaidahnya: Bertindaklah sedemikian rupa sehingga engkau mencapai jumlah nikmat yang paling besar, atau: sehingga engkau menghindari segala macam rasa sakit sedapat-dapatnya.

Hedonisme psikologis: teori tentang manusia (bukan teori etika) yang menyatakan bahwa akhirnya manusia didalam segala usahanya hanya mencari rasa nikmat saja.

Pernyataan 11:

Hedonisme egois, seperti setiap egoisme, tidak mencukupi sebagai norma moral dasar, sedangkan hedonisme psikologis tidak sesuai dengan kenyataan.

b. Eudemonisme

(79) Pandangan yang sejak Kant disebut Eudemonisme, pertama-tama diutarakan oleh Aristoteles didalam bukunya Etika Nikomacheia. Aristoteles mulai dengan menyatakan bahwa setiap tindakan mempunyai tujuannya. Tetapi ada dua macam tujuan: Tujuan yang dicari demi suatu tujuan selanjutnya dan tujuan yang dicari demi dirinya sendiri. Misalnya tujuan kepandaian dalam ilmu kedokteran itu sendiri hanya alat demi tujuan selanjutnya, yaitu supaya orang sakit dapat disembuhkan. Menurut Aristoteles tak mungkin ada semua tujuan kita cari demi tujuan lain lagi.

Akhirnya mesti ada tujuan yang dicari demi dirinya sendiri. Tujuan itulah yang kita sebut baik pada dirinya sendiri. Maka untuk mengetahui bagaimana sebaiknya kita bertindak perlu kita menemukan apa yang menjadi tujuan pada dirinya sendiri.

Menurut Aristoteles apa yang dicari demi dirinya sendiri hanyalah satu: kebahagiaan (eudaimonia). Maka kaidah dasar etikanya dapat dirumuskan begini: Bertindaklah sedemikian rupa sehingga engkau mencapai kebahagiaan.

Selanjutnya Aristoteles menyelidiki apa yang sungguh2 membahagiakan manusia. Uraianya sampai sekarang termasuk yang paling baik yang pernah ditulis tentang masalah itu. Aristoteles menegaskan bahwa kebahagiaan tercapai bukan dalam menderita sesuatu melainkan dalam tindakan atau kegiatan. Tetapi dalam kegiatan mana? Jawabnya: dalam kegiatan yang merealisasikan/menjadikan nyata bakat2 dan kesanggupan2 manusia. Kita juga dapat mengatakan: tindakan yang mengembangkan manusia mencapai kebulatan kesempurnaannya. Seorang yang berbakat musik mesti mengembangkan bakat itu sampai ia menjadi pemain alat musik yang cakap. Seorang olahragawan melatih badannya. Seorang tukang kayu yang pandai dalam kependaiannya itu akan merasa bahagia. Dst. dst.

Jadi Aristoteles menahani bahwa kebahagiaan terletak dalam mencari kesempurnaan, yaitu dalam mengembangkan dan membulatkan semua bakat yang dimiliki manusia. Paham itu kemudian diambil over oleh Thomas Aquinas, Hegel dan Marx dan sekarang diakui sebagai salah satu patokan dasar pendidikan: bantulah orang supaya ia dapat mengembangkan kepribadiannya.

(80)

Dalam hubungan inipun Aristoteles mengutarakan pendapatnya yang terkenal tentang tiga bentuk hidup yang menjadi tujuan pada dirinya sendiri: hidup mencari nikmat, hidup berpolitik dan hidup berfilsafat. Hidup mencari nikmat menurut Aristoteles justru tidak akan membawa manusia kepada kebahagiaan. Karena nikmat itu kesenangan manusia sejauh ia sama sifatnya dengan kerbau, jadi justru tidak mengembangkan manusia sebagai manusia. Nikmat itu tidak jelek menurut Aristoteles. Tetapi jangan dijadikan tujuan kegiatan manusia. Argumennya selanjutnya telah kami lihat dalam membicarakan hedonisme.

Dengan hidup berpolitik Aristoteles memaksudkan kegiatan kemasyarakatan manusia. Menurut Aristoteles manusia itu makhluk yang masyarakat (zoon politikon) - dan itu yang membedakannya baik dari yang lain merupakan dari binatang. Maka kegiatan politik itu kegiatan yang paling sesuai dengan manusia dan oleh karena itu didalamnya orang akan merasa bahagia.

Tetapi kegiatan manusia yang paling luhur itu kegiatan berfilsafat. Karena berfilsafat itu kegiatan akal-budi manusia, yang disebut logos atau nus dan bersifat ilahi. Adalah keluhuran manusia bahwa dengan logisnya ia ada unsur ilahinya: manusia adalah makhluk berekalbudi (zoon Ilogon echon). Maka kegiatan yang paling membahagiakan manusia adalah berfilsafat: memandang dan merenungkan hal2 abadi. Tetapi karena manusia bukan hanya terdiri dari logos, ia sebaiknya jangan hanya berfilsafat saja melainkan juga berpolitik. Demikianlah garis dasar etika Aristoteles.

(81)

Disini bukanlah tempatnya untuk membicarakan ajaran Aristoteles tentang tiga cara hidup itu. Cukup dicatat bahwa paham Aristoteles tentang kebahagiaan sebagai keadaan yang tercapai dalam mengembangkan kecakapan2 bakat2 manusia kita termasuk sumbangan besar pada pengertian manusia tentang dirinya sendiri.

Tetapi yang masih perlu dipersoalkan ialah: Andaiatapun betul apa yang dikatakan Aristoteles tentang kebahagiaan, khususnya bahwa kebahagiaan ialah yang dicari oleh manusia demi dirinya sendiri, apakah betul juga bahwa mencari kebahagiaan itu norma moral dasar? Apakah memang cukup kalau kita masing2 mencari kebahagiaan, yaitu kebahagiaan kita sendiri? Ternyata telah bahwa eudemonisme termasuk teori2 egois. Dan oleh karena itu kena kritik yang telah diajukan diatas terhadap segala macam egoisme etis. Jadi walaupun mengembangkan diri kita dan mencari kebahagiaan itu sesuatu yang wajar, namun tidak mencukupi sebagai sikap moral. Orang lain tidak hanya boleh kita anggap sebagai alat untuk mencari kesempurnaan kita sendiri atau untuk menjadi bahagia. Memberi derma kepada fakir miskin tidak demi dia sendiri, melainkan demi kesempurnaan saya, malah menghina dia dan bukanlah suatu sikap moral yang baik. Dari kita dituntut agar kita kadang2 melupakan diri dan menyerahkan diri sama sekali bagi seseorang atau bagi masyarakat. Bahkan ada kemungkinan bahwa manusia baru berkembang sungguh2 sebagai manusia apabila ia tidak lagi mengambil pusing tentang pengembangannya sendiri melainkan membuka diri tanpa pamrih bagi rekan manusia.

(82) Rangkuman

Istilah-istilah:

Eudemonisme: pendapat etika normatif yang menganggap kebahagiaan sebagai satu-satunya yang baik demi dirinya sendiri bagi manusia.

kesidahnya: bertindaklah sedesikian rupa sehingga engkau mencapai kebahagiaan yang sebesar mungkin.

Mencari kesempurnaan: menurut Aristoteles, dengan mengembangkan segala kecakapan/bakat yang ada pada kita.

Norma moral dasar: norma daripadanya semua norma moral lainnya mendapat kekustannya.

Pernyataan 12:

Mencari kesempurnaan dan kebahagiaannya sendiri saja tidak mencukupi sebagai norma moral dasar.

(83) 2. Teori-teori deontologis

Teori2 yang sudah kita lihat, adalah egois: orang diharapkan bertindak sedemikian rupa sehingga menghasilkan akibat2 yang sebaik mungkin bagi dirinya sendiri. Teori2 egois itu bersifat teleologis: betul-tidaknya suatu tindakan diukur dari apakah menghasilkan akibat2 yang baik.

Kaum deontolog menentang tidak hanya egoisme moral melainkan etika teleologis seluruhnya. Mereka menentang bahwa suatu tindakan dinilai dari akibat2-nya. Argumen mereka sebetulnya mudah dimengerti. Mereka mengatakan: apakah saya harus jujur atau tidak, tidak pernah tergantung dari akibat tindakan jujur atau tindakan tak jujur: saya selalu harus bertindak dengan jujur, bagaimanapun akibatnya bagi saya dan bagi orang lain. Tindakan tak jujur tak pernah, dengan alasan apapun juga, dapat dibenarkan. Hal yang sama berlaku bagi kesetiaan, keadilan, kebaikan hati. Apakah pernah saya boleh bertindak tak setia, tak adil? Kalau seribu orangpun beruntung daripada suatu tindakan tak adil terhadap seseorang, tetap tindakan itu tak boleh saya jalankan. Mereka yang berpendapat demikian, disebut deontolog.

Secara lebih abstrak pendapat ini dapat dirumuskan begini: betul-tidaknya suatu tindakan atau peraturan tidak diukur pada akibat2-nya, melainkan berdasarkan sifat2 tertentu dari tindakan/peraturan itu sendiri: ada tindakan yang boleh, ada juga yang tak pernah boleh, habis perkara, tak pandang untung-ruginya dari akibat-akibatnya.

Akan tetapi, perlu kita bedakan antara dua macam teori deontologis yang cukup berlainan. Yang satu mengatakan bahwa ada peraturan moral umum yang selalu berlaku (misalnya: bertindaklah selalu dengan jujur!), maka disebut "teori deontologis peraturan"; yang satunya menolak segala macam peraturan moral umum; menurut pendapat itu setiap orang harus memutuskan sendiri bagaimana ia harus bertindak dalam situasi tertentu. Pendapat itu disebut Etika Situasi.

(84)

a. Etika Situasi

Istilah "Etika Situasi" dipergunakan untuk pelbagai pendapat. Yang kami maksud dengan istilah ini hanyalah teori2 etika yang mengatakan bahwa setiap situasi adalah unik, berlainan dalam segala segi dari semua situasi lain didunia, sehingga tak mungkin menaseng peraturan bagaimana seseorang harus berlaku. Tidak pernah dua orang berada dalam situasi yang sama, dan orang yang samipun tidak mungkin dua kali berada dalam situasi yang tepat sama. Oleh karena itu, menurut etika situasi, dalam setiap situasi setiap orang mesti menentukan sendiri bagaimana ia harusnya bertindak, tak ada gunanya menaseng peraturan umum. Misalnya saja tak berguna menaseng norma moral "jangan bohong": karena setiap situasi itu unik, maka "bohong" itu lain artinya dalam setiap situasi, apalagi belum tentu bahwa tidak ada situasi didalamnya orang justru harus bohong. Teori ini tergolong teori deontologis tindakan: Setiap tindakan individual pada dirinya sendiri lepas dari pertimbangan hasilnya, ditentukan betul-tidaknya.

Unsur positif teori ini ialah bahwa kekakuan teori deontologis peraturan (lihat dibawah) diatasi. Tidak dapat disangkal bahwa tak pernah ada dua situasi yang sama sekali sama. Belum tentu si A dapat menentukan bagaimana si B harus bertindak dalam situasi S, supaya sesuai dengan tuntutan kejujuran (misalnya). Tetapi apakah dari kenyataan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak ada norma2 moral umum?

Untuk menjawab pertanyaan itu perlu kita adakan beberapa distingsi. Pertama kita perlu membedakan antara norma2 moral dasar dan norma2 moral

Kongkrit. Yang pertama adalah himpunan norma2 seperti: bertindaklah dengan jujur, setia, adil, baik hati dsb. Norma2 ini tidak kongkrit: kita tidak langsung mengetahui bagaimana kita harus bertindak apabila disuruh bertindak dengan jujur dsb. Tetapi norma2 itu mendasari norma2 kongkrit. Norma2 kongkrit hanya berlaku sejauh berdasarkan norma2 dasar tadi. Suatu norma moral disebut kongkrit kalau mengandung tindakan kongkrit, seperti: jangan mematikan orang, jangan mengambil barang milik orang lain (rumus2 seperti "jangan membunuh", "jangan berzinah", "jangan mencuri" kiranya berada ditengah-tengah norma dasar dan norma kongkrit: mematikan orang baru dilarang kalau merupakan pembunuhan, tetapi tidak langsung jelas apakah setiap pematitan orang itu memang pembunuhan).

Distingui kedua yang perlu diperhatikan adalah antara norma2 moral kongkrit umum dan norma2 moral kongkrit individuil: Contoh untuk yang pertama: jangan mengambil barang dari toko orang lain tanpa membayar! Contoh untuk yang kedua: jangan mengambil arloji ini! Jadi yang umum berlaku untuk lebih dari satu kala, yang individuil hanya tentang tindakan tertentu pada tempat dan waktu tertentu.

(85)

Mari kita sekarang kembali kepada Etika Situasi. Apakah betul pendapatnya, bahwa sama sekali tidak ada norma moral?

Kita telah melihat bahwa memang setiap situasi ada keunikannya. Maka dari itu kiranya betul bahwa tak ada norma moral kongkrit individuil. Bagaimana si A harus bertindak dalam situasi S, akhirnya hanya dapat ditentukan oleh si A sendiri. Bahkan itu sudah kita lihat dalam peninjauan fenomenologis: akhirnya setiap orang harus bertindak berdasarkan keinsafannya sendiri pada saat itu.

Tetapi apakah itu berarti bahwa tidak ada norma2 moral umum? Walaupun setiap situasi ada keunikannya, namun ada juga banyak unsur yang tidak unik! Seperti setiap meja itu ada keunikannya, tetapi ada juga segi umumnya; berdasarkan segi umum itulah baru dapat kita sebut meja. Fakta bahwa kita mempunyai bahasa, bahwa kita dapat membicarakan suatu situasi "unik" dengan mempergunakan kata2 umum, menunjukkan, bahwa setiap situasi ada unsur umum juga. Maka pengandaian Etika Situasi tentang keunikan total setiap situasi tidak dapat dipertahankan.

Igapula, seandainya Etika Situasi benar, tak mungkinlah kita mengadakan dialog tentang norma2 moral. Dialog itu hanya mungkin apabila ada norma2 yang berlaku untuk lebih dari satu kali. Tak mungkinlah kita persoalan apakah abortus boleh atau tidak. Tak mungkin pula memberi nasihat moral kepada orang lain; padahal kita tahu betapa besar gunanya nasihat seorang bijaksana dalam keadaan yang sulit.

Tetapi kelemahan pokok Etika Situasi adalah bahwa tidak sesuai dengan fenomena rasionalita kesadaran moral. Dalam peninjauan fenomenologis telah kita lihat, bahwa setiap kesadaran adanya kewajiban kongkrit sekaligus mengandung kesadaran, bahwa setiap orang dalam situasi semacam itu berkewajiban sama, dan bahwa sayapun pada lain waktu dan lain tempat berkewajiban sama asal situasi itu kurang lebih sama. Setiap pernyataan moral adalah umum secara implisit: sekaligus kita yakin bahwa orang lain dalam situasi ini akan harus bertindak seperti kita pula, serta kita sekaligus mengikat diri untuk mengulangi pernyataan itu dalam situasi lain yang mirip dengan situasi tadi walaupun tempat, waktu dan orang2 itu berlainan.

(n.b.: Walaupun J. Fletcher ("Situation Ethics", London 1966) menerina cintakasih sebagai hukum moral dasar, namun ia tetap tergolong Etika Situasi diatas ini, karena ia menolak adanya norma2 moral kongkrit umum).

(86) Rangkuman:

Istilah-istilah:

Kaidah teori2 etika deontologis: betul-tidaknya dari suatu tindakan atau peraturan tidak diukur dari akibat2-nya, melainkan berdasarkan sifat2 tertentu dari tindakan/peraturan itu sendiri.

Kaidah teor. et. deont.tindakan: sama dengan kaidah etika situasi.

Kaidah Etika Situasi: karena setiap situasi itu unik, maka betul salahnya suatu tindakan hanya dapat diputuskan oleh yang bersangkutan dalam dan untuk situasi yang tertentu; norma2 moral (kongkrit) umum tidak ada.

norma2 moral dasar: yang tidak mengenai suatu tindakan kongkrit-empiris tertentu, tetapi mendasari berlakunya norma2 kongkrit.

norma2 moral kongkrit: yang mengenai suatu tindakan kongkrit empiris.

norma2 moral umum: yang berlaku berdasarkan ciri2 tertentu salah satu situasi, lebih dari satu kali.

norma2 moral individuil: yang berlaku hanya untuk tindakan tertentu pada tempat dan waktu tertentu.

tiga kekeliruan etika situasi:

- (1) Tidak memperhatikan bahwa setiap situasi ada unsur umum juga.
- (2) Tidak dapat menerangkan mengapa kita dapat memberi nasehat moral kepada orang lain.
- (3) Tidak memperhatikan bahwa setiap pernyataan moral berlaku umum secara implisit.

Pernyataan 13:

Adanya norma2 moral umum harus diterima. Tetapi norma2 umum itu tidak pernah mencukupi untuk memastikan seluruhnya bagaimana seseorang harus bertindak dalam situasi kongkrit.

(87) Sisipan: Arti perintah dan larangan2 moral

Pernyataan 13 menunjukkan bahwa Etika Situasi tidak sama sekali keliru. Kalau Etika Situasi hanya mau melawan etika peraturan yang mau menentukan tindakan orang sampai kepada pelaksanaan dengan peraturan2 saja, kami setuju: selalu tinggal suatu ruang kebebasan moral terakhir didalamnya hanya orang yang bersangkutan dapat memastikan apa yang pada saat itu menjadi kewajibannya.

Yang ketorlalluan dari Etika Situasi ialah bahwa mereka menarik kesimpulan bahwa semua orang dapat dibuang ketempat sampah. Bahwa setiap keputusan moral kongkrit mengandaikan berlakunya norma2 moral dasar, sudah dapat difahami: andaikata bahkan tidak pasti apakah kita memang selalu harus berbuat baik, maka tidak ada kemungkinan mengambil suatu keputusan moral lagi. Sekurang-kurangnya harus diterima bahwa manusia sedapat mungkin harus bersikap baik terhadap orang lain, jujur, adil, setia, bahwa selalu lebih baik untuk tidak menyiksa suatu makhluk hidup daripada menyiksanya kalau tak ada alasan khusus. Kalau itu semua tidak diterima, maka dalam situasi kongkrit orang tak pernah dapat tahu bagaimana seharusnya ia bertindak. Untuk itu ia harus sudah yakin bahwa ia seharusnya bersikap baik, adil dst., tinggal saja pertanyaan tindakan mana yang harus diambil supaya menang baik dan adil.

Jadi menolak norma2 moral dasar sama sekali tidak mungkin kalau masih mau mempertahankan bahwa orang hendaknya bertindak sesuai dengan kewajibannya. Orang seperti Fletcher memang akan menerima berlakunya norma2 moral dasar (yang belum kami pastikan sampai sekarang).

Tetapi bagaimana halnya norma2 moral kongkrit (umum) seperti "sepuhul perintah Tuhan"? Bukankah kami sendiri mengatekan bahwa belum tentu tak pernah boleh mencuri atau menubunh atau melakukan hubungan seks diluar perkawinan? Bukankah kami baru saja mengatakan bahwa norma2 itu tidak pernah begitu saja mengikat, bahwa berlakunya dalam situasi kongkrit tergantung dari keinsyafan kongkrit? Memang demikianlah. Jadi norma2 dasar berlaku selalu dan dimana-mana, namun belum kongkrit, sedangkan norma2 kongkrit belum tentu berlaku selalu dan dimana-mana. Lantas buat apa norma-norma moral kongkrit masih diperlukan?

Jawabnya ialah bahwa perintah2 dan larangan2 itu (itu yang dimaksud dengan norma2 moral kongkrit) memang tidak mengikat mutlak melainkan dapat dibandingkan dengan tanda2 peringatan: Awas, disini bahaya melanggar norma-norma moral (dasar)! Perintah dan larangan2 itu merupakan suatu bantuan. Berdasarkan kesamaan manusia yang tetap ada walaupun sudah mengalami banyak perubahan dan walaupun ada banyak perbedaan antara bangsa2, berdasar-

kan juga pada pengalaman kolektif umat manusia dan bangsa2-nya, dirumus perintah2 dan larangan2 moral itu. Sudah pasti: pada umumnya norma2 itu mengikat, tetapi mungkin juga sekali2 tidak. Maka kalau tidak ada situasi yang sangat khusus, manusia boleh saja percaya kepada tanda2 peringatan itu. Tak perlu dalam setiap situasi biasa ia mengadakan pertimbangan mendalam tentang bagaimana mesti bertindak, mengingat semua seribu satu faktor penting yang perlu diperhatikan, supaya tindakannya adil dst. Pertimbangan itu tidak dilarang (walaupun sulit: dengan pengetahuan individual kita yang terbatas mungkin sekali kita melupakan beberapa unsur penting!), tetapi biasanya tak perlu sehingga kita dapat menghafat banyak tenaga.

Maka walaupun norma2 moral kongkrit umum memang belum tentu selalu mengikat, norma2 itu sangat berguna bagi kita dan mengijinkan kita untuk mengembangkan kebiasaan2 moral yang membuat kita lebih cakap dan mudah memiliki apa yang harusnya kita lakukan.

(88)

b. Tentang teori2 deontologis peraturan

Walaupun teori2 deontologis peraturan tergolong dalam himpunan sana dengan Etika Situasi, namun sifatnya sangat berlainan, bahkan barangkali langsung bertentangan. Teori deontologis peraturan paling sesuai dengan pendapat orang biasa tentang hal moral. Menurut teori itu ada beberapa norma atau peraturan moral yang berlaku begitu saja. Peraturan2 itu tidak lagi dapat disimpulkan dari pendapat moral umum karena berlaku pada dirinya sendiri. Berlakunya itu tidak tergantung dari akibat2 tindakan yang sesuai dengan peraturan itu. Betul-salahnya suatu tindakan diukur pada peraturan2 itu.

Beberapa contoh peraturan dapat memperlihatkan apa yang dimaksud. Ambil peraturan2 ini: "jangan bohong!", "jangan bunuh diri!", "bertindaklah adil terhadap setiap orang saja!". Apakah peraturan2 itu ada kekecualiannya? Bukankah selalu berlaku, tak tergantung apakah menguntungkan saya ataupun suatu mayoritas? Bukankah kita terus menegur orang yang bohong atau berlaku tidak adil - tanpa bertanya apakah perbuatannya itu ada akibat baiknyapun juga? Bukankah peraturan2 itu berlaku begitu saja? Keras deontolog - kiranya bersama dengan kebanyakan orang rakyat yang kita tanya - dengan tegas membenarkan pertanyaan itu.

Maka pendapat etika deontologis peraturan dapat dirumus begini: norma2 moral berlaku begitu saja, tidak tergantung dari untung-rugi akibat penetrapannya.

Kesulitan terhadap teori itu ada dua: Pertama, bagaimana kita harus bertindak kalau tindakan kita kena dua norma yang saling bertabrakan, misalnya kalau dengan bertindak adil terhadap si A saya membuat putus asa si B (= melanggar norma "bersikaplah baik terhadap sesama"), sedangkan dengan menyelamatkan si B dari rasa putus asa saya memperlakukan si A dengan tak adil. Kesulitan kedua ialah bahwa menurut pendapat moral umum, semua, atau hampir semua peraturan moral sekali2 ada kekecualiannya. Misalnya, kalau dalam rumah saya ada seseorang bersembunyi yang dicari oleh dua pembunuh bayaran, dan dua pembunuh itu bertanya pada saya apakah orang itu berada didalam rumah saya, bukankah saya wajib bohong kepada mereka?

Kedua kesulitan itu tidak dapat dipecahkan oleh suatu teori deontologis selulu, oleh karena pemecahan itu rupa2nya tergantung dari suatu pertimbangan terhadap akibat2 tindakan itu (apakah ketidakadilan lebih merugikan A daripada rasa putus asa merugikan B?; apakah akibatnya apabila saya mengatakan kebenaran kepada para pembunuh itu?), padahal teori deontologis menolak pertimbangan daripada akibat2 suatu tindakan.

(89)

Suatu jalan keluar dari kesulitan ditunjuk oleh Kant. Menurut Kant hanya ada satu peraturan moral dasar - dan peraturan itu berlaku tanpa kekecualian - yaitu, agar kita selalu bertindak sedemikian rupa sehingga setiap orang lainpun dapat bertindak demikian. Dari norma dasar ini semua norma moral lainnya mendapat kekuatannya. Dengan demikian Kant dapat mencegah terjadinya pertentangan antara dua norma, karena akhirnya memang hanya ada satu saja. Kalannya teori Kant ialah bahwa ia tidak berhasil untuk memperlihatkan, bagaimana semua norma moral dapat disimpulkan dari norma dasar yang satu itu (lihat sisipan berikut).

(90)

Suatu perbedaan penting dikemukakan oleh W.D. Ross (1877 -). Ross membedakan antara kewajiban2 yang berlaku prima facie dan kewajiban yang sempurna berlaku. Menurut Ross, semua kewajiban moral memang berlaku tanpa

kekecualian, tetapi hanya prima facie. Berlaku prima facie berarti: berlaku kalau masalahnya hanya dilihat dari segi kewajiban itu saja, jadi kalau tidak ada alasan moral dari segi kewajiban lain yang perlu diperhatikan. Dengan demikian suatu kewajiban hanya mengikat, kalau tak ada kewajiban lain yang juga kena. Kalau ada kewajiban yang bertentangan, orang yang bersangkutan harus memilih menurut keinsyafannya sendiri, dan untuk itu tak ada peraturan lagi. Jadi suatu norma moral dengan sendirinya hanya berlaku prima facie, tidak sungguh2. Manakah kewajiban yang sungguh2 berlaku bagi seseorang, artinya yang betul2 mengikat dia dalam batin, tidak dapat dipastikan secara teoretis.

Distingui ini amat penting, namun kiranya belum memecahkan semua kesulitan etika deontologis. Etika deontologis tidak dapat memberikan kriteria mengapa sesuatu harus diterima sebagai kewajiban prima facie. Menurut para pengikutnya, asal orang membuka matanya, dia pasti melihat bahwa tak boleh bohong dsb. Tetapi itu berarti bahwa tentang norma2 moral itu tak mungkin diadakan dialog (seperti tak mungkin mengadakan dialog tentang warna langit: atau orang melihat bahwa langit itu biru, atau tidak melihatnya, habis perkara). Selain dari itu kiranya tetap ganjil bahwa suatu norma moral dianggap berlaku (pun prima facie saja) dengan sama sekali tidak menghiraukan apakah akibat pengetrapannya itu baik atau buruk.

(91) Rangkuman

Istilah - istilah:

Kewajiban berlaku prima facie: berlaku sejauh tak ada norma moral lain yang perlu diperhatikan.

Kewajiban berlaku sungguh2: yang wajib dijalankan oleh yang bersangkutan, sehingga ia bersalah dalam arti moral (=berdosa) apabila tidak dijalan-
kannya.

teori deontologis peraturan: ada beberapa norma/peraturan moral yang berlaku begitu saja, umum dan selalu, tidak tergantung dari akibat (baik atau buruk) pengetrapannya.

Pernyataan 14:

Norma2 moral hanya berlaku prima facie, sedangkan apa yang sungguh2 menjadi kewajiban orang dalam situasi tertentu hanya dapat dipastikan oleh orang yang bersangkutan.

(92) Sisipan I: Formalisme Immanuel Kant

Kant terkenal karena usahanya untuk mengembalikan semua norma moral kepada satu norma dasar saja yang disebutnya imperatip kategoris. Salah satu rumus imperatip itu berbunyi sbb: "Bertindaklah selalu menurut kaidah yang sekaligus dapat kaukehendaki menjadi hukum umum!"

Yang paling menyolok dalam imperatip itu adalah bahwa kaidah dasar sama sekali formal. Artinya: tidak mengatakan apa yang harus dilakukan (misalnya: jangan mencuri), melainkan syarat mana yang harus terpenuhi dalam setiap tindakan manusia. Tetapi, begitu kita bertanya, bagaimana saya dalam situasi kongkrit dapat mengetahui apa yang wajib saya perbuat? Menurut Kant itu mudah: Setiap kemungkinan untuk bertindak tentu ada pertimbangannya. Pertimbangan yang menjadi dasar tindakan kita, disebut kaidah. Sekarang kita periksa apa yang akan terjadi andaikata setiap orang mau bertindak sesuai dengan kaidah itu. Jadi apakah kita sendiri dapat mengharap-
kan agar kaidah tindakan kita juga diterima orang lain atau bahkan dijadikan hukum umum.

Kant sendiri menjelaskan pengetrapan imperatip kategorisnya dengan contoh orang yang mau meminjam uang dan memberi janji bahwa yang itu akan dikembalikannya, padahal ia sekaligus tahu bahwa pasti tidak / dikembalikannya. Jadi orang itu bertindak berdasarkan kaidah: apabila aku butuh uang, aku akan meminjamnya dan akan berjanji akan mengembalikannya, biarpun aku tahu bahwa itu tak akan terjadi. Untuk mengetahui apakah tindakan itu boleh atau tidak, perlu ditanyakan apakah kaidah itu dapat dikehendaki menjadi hukum umum. Bagaimana kalau kaidah itu umum berlaku? Tentu saja tak akan ada

akan

↳ dapat

yang masih mau meminjamkan uangnya karena setiap orang tahu, bahwa uangnya tak akan kembali. Jadi saya tidak menghendaki kaidah saya menjadi hukum umum karena lentas maksud saya sendiri untuk mendapat pinjaman justru tak akan terlaksana. Dengan demikian jelaslah menurut Kant bahwa rencana saya diatas tidak boleh.

Kant mengira bahwa dengan imperatip kategoris yang sama sekali formal itu, telah ditutupnya pintu terhadap segala bentuk eudemonisme. Kant berpendapat bahwa setiap pertimbangan untung-rugi merusakkan nilai moral suatu tindakan. Ia menuntut agar tindakan moral kita lakukan dahulu demi melakukan kewajiban kita, bukan karena hati kita tergores oleh penderitaan orang lain. Berbuat baik karena perasaan iba kasihan bukan lagi suatu tindakan yang bernilai moral bagi Kant. Itulah rigorisme (dari Latin "rigor" = kaku, keras) dari etika Kant. Walaupun Kant dengan demikian mau menyelaraskan rasionalitas sikap moral, ia justru membahayakannya: baru kalau kewajiban kita terina demi nilainya dan bukan demi sifat wajibnya, penerimaaan itu masuk akal.

Kant keliru kalau mengira bahwa dengan imperatip kategorisnya dapat menerangkan manakah kewajiban2 kita. Dari suatu yang dahulu formal secara logis mustahil dicapai isi2 material. Kant hanya bisa memperlihatkan bahwa ada kaidah2 yang bertentangan pada dirinya sendiri kalau diterima umum. Tetapi ia tidak dapat menunjukkan manakah kewajiban2 kita secara positif, kecuali kalau apa yang mau dibuktikan secara diam2 sudah diandaikan. Menurut metode Kant apa saja yang dapat dibuktikan menjadi kewajiban kita: bukankah tidak bertentangan menghendaki agar segenap manusia habis tidur harus berdiri dulu selama lima menit diatas kaki kirinya saja? Tetapi apakah dengan demikian kita wajib berdiri diatas kaki kiri waktu pagi hari? Kekeliruan Kant itu telah dibuka dengan tajam oleh G.F. Hegel.

(93) Sisipan II: Etika Nilai

Tokoh Etika Nilai adalah Max Scheler (1874 - 1928). Scheler dipengaruhi oleh metode fenomenologis E. Husserl (1859 - 1938). Berdasarkan suatu analisa fenomena kesadaran moral Scheler menolak formalisme kosong Kant dan menunjukkan bahwa kita bertindak untuk mencapai nilai2. "Nilai" ditentukannya sebagai suatu 'kwalitas material', suatu sifat berisi. Nilai itu tidak "ada" melainkan "berlaku". Nilai tidak dapat dikembalikan kepada unsur2 empiris dunia kita. Nilai2 itu disusun dalam suatu hirarki: nilai2 perasaan indrawi, nilai2 hidup (kesehatan), nilai2 rohani yang dibagi lagi/dalam nilai2 estetis, moral dan intelektual. Nilai tidak ditanggap dengan cara berfikir melainkan "dirasakan" ("intentionales Wertfuehlen"). Diantara nilai2 kita wajib memilih yang lebih tinggi.

↳ ke

Teori ini diperbaiki lagi oleh Dietrich von Hildebrand (1889 - 1966) dengan menunjukkan bahwa kewajiban kita bukanlah selalu memilih nilai yang lebih tinggi, melainkan untuk memberikan jawaban yang semestinya kepada setiap nilai yang berarti secara moral. von Hildebrand menamakan distingsi penting antara nilai2 moral dan nilai2 yang berarti bagi pertimbangan moral (distingsi itu ternyata membuka kemungkinan untuk suatu etika utiliteris yang tentu akan sangat ditentang oleh von Hildebrand sendiri). Justru etika von Hildebrand - yang sangat kurang dikenal - dapat membantu dalam pemecahan masalah2 etika analitis juga. Dilain pihak, etika fenomenologis perlu terhadap pertanyaan2 dari etika normatif analitis, metafisika dan psikoanalisa supaya menjadi lebih kritis terhadap pengandaian2nya sendiri.

Akhirnya kami sebut Nikolai Hartmann (1882 - 1950) yang meneruskan filsafat Scheler tentang dunia "nilai" disamping dunia yang "ada" dan menggabungkan nilai2 itu mirip dengan ide2 Platon sebagai realitas ideal; dengan demikian perpisahan antara bidang dari apa yang "ada" dan bidang nilai2 yang "berlaku" menjadi mutlak, perisahan mana merupakan titik tolak dalam etika nilai.

(94) 3. Utilitarisme

Sesudah egoisme moral kita selidiki dan sesudah kelesahan2 daripada teori2 deontologis menjadi kentara, tinggallah teori utilitarisme untuk di- periksa.

Utilitarisme (dari Latin "utilis" = berguna) adalah teori teleologis un- iversalis. Teleologis karena mengukur betul-salahnya tindakan manusia dari manfaat akibatnya. Jadi larangan "bohong tidak boleh" itu tidak berlaku de- ngan sendirinya melainkan karena akibat2 dari bohong itu lebih jelek dari- pada akibat2 kalau kita mengatakan benar. Andaikata akibat2 kebohongan le- bin baik daripada akibat2 kebenaran, kita wajib bohong. Lebih tepat lagi utilitarisme mengatakan bahwa kita wajib berusaha untuk selalu menghasil- kan kelebihan yang se-besarnya daripada akibat2 baik terhadap akibat2 bu- ruk. Atau dengan kata lain: diantara semua tindakan yang mungkin kita ambil, yang betul adalah tindakan yang - sejauh dapat kita perhitungkan - akan pal- ling menajukan kepentingan semua orang yang dapat kita pengaruhi.

Utilitarisme bersifat universalis karena yang menjadi norma moral bu- kanlah akibat2 baik bagi si pelaku itu sendiri saja melainkan akibat2 baik diseluruh dunia, kepentingan dari semua orang, termasuk kita sendiri, yang akan terpengaruh oleh tindakan kita. Maka utilitarisme mengatasi egoisme dan membenarkan sikap2 sosial. Utilitarisme membenarkan bahwa pengorbanan dari kepentingan atau nikmatnya sendiri demi orang lain dapat merupakan tin- dakan yang paling tinggi nilai moralnya.

Utilitarisme membuka pintu bagi suatu penghayatan moral yang sangat berlainan dengan penghayatan moral deontologis. Tidak diakui lagi bahwa a- da tindakan2 yang pada dirinya sendiri wajib ataupun terlarang. Semua tin- dakan pada dirinya sendiri dianggap netral. Yang memberi nilai moral kepa- da tindakan2 itu ialah akibat2nya. Betapa besar perbedaan antara pendeka- tan utilitarisme dan pendekatan deontologis kelihatan dalam hal boleh-ti- daknya melaksanakan hubungan seks diluar perkawinan. Bagi seorang deontolog jawabannya jelas: tidak boleh, sudahlah tek usah mempersalahkan alasan. Se- dangkan si utilitaris akan bertanya, mengapa sebetulnya (misalnya) tidak boleh melaksanakan hubungan seks diluar perkawinan; ia menuntut agar diberikan alasan2 yang masuk akal, dengan mempertimbangkan akibat2 baik dan akibat2 buruk dari hubungan seks diluar perkawinan.

Dengan demikian utilitarisme sering dipergunakan sebagai alat kritik terhadap pendapat2 moral tradisional yang dituntut agar dipertanggungjawab- kan, dan kalau tidak dapat, supaya ditindakan (dapat dicatat, bahwa sebe- tulnya utilitarisme tidak dapat langsung mengkritik teori deontologis, oleh karena kritik utilitarisme baru kena apabila utilitarisme sudah diterima, artinya, apabila sudah diterima bahwa betul-tidaknya tindakan diukur dari akibatnya; kalau itu tidak diterima, pertimbangan2 utilitarisme tidak kena; tetapi fakta saja bahwa suatu peraturan moral dipersoalkan yang sejak dahulu dianggap berlaku dengan sendirinya, sudah merupakan suatu relativasi besar terhadapnya).

Karena utilitarisme mempertimbangkan akibat baik dan buruk, utilitaris- me mengundahkan suatu teori tentang yang baik dan buruk, artinya diandalkan salah satu teori nilai. Salah satu, karena segala macam teori nilai dapat dihubungkan dengan utilitarisme. Utilitarisme hanya menuntut maksimalisasi dari akibat2 baik, sedangkan apa yang dianggap baik dapat berbeda-beda. Maka ada utilitarisme hedonis, ada juga yang eudaimonis atau pluralis (artinya: mengenal pelbagai hal yang bernilai pada dirinya sendiri, bukan hanya satu sa- ja).

(95) Kesulitan teoretis utilitarisme yang paling besar adalah masalah kwanti- fikasi dari akibat baik dan buruk. Bagaimana jumlah akibat baik dan buruk mau diperhitungkan? Bagaimana nilai2 yang begitu berlainan sifatnya dapat diperband- ingkan satu sama lain? Bagaimana misalnya mau ditentukan mana dari tindakan2 berikut menghasilkan kelebihan akibat baik yang paling besar: makan sekor a- yam atau sekor Berek, nonton tari legang selama 30 menit atau mengikuti diskusi ten- tang sandiwaja karangan Arifin C.Noor selama 100 menit?

Untuk menjawab pertanyaan semacam itu, Jeremy Bentham (1748 - 1832), se- orang utilitaris dan hedonis Inggris, mencoba untuk memperhitungkan "nilai senang" dari pelbagai kegiatan manusia guna dapat diperbandingkan satu sama lain jumlahnya. Tetapi hasilnya tidak meyakinkan. Maka John Stuart Mill (1806- 1873) dalam karyanya yang terkenal "Utilitarianism" (yang pertama-tama me-

rumuskan teori utilitarisme secara khusus) mengakui bahwa usaha semacam itu tidak dapat berhasil. Ia memasukkan unsur baru kedalam perhitungannya, yaitu unsur "kwalita" disamping unsur "kuantita". Akan tetapi, dengan berbuat demikian suatu "perhitungan" tepat tentang jumlah akibat baik dan buruk sama sekali tidak mungkin lagi.

Dilain pihak kesulitan itu tidak boleh dilebih-lebihkan. Dalam teori memang sulit sekali memperbandingkan nilai2 yang berlainan secara kwalitatif. Namun dalam praktek hidup sehari-hari biasanya kita dapat kurang lebih menastikan, baik bagi kita sendiri maupun bagi orang lain yang kita kenal, apa yang pada saat tertentu lebih baik: ayam Bokok Bokok, tari legong atau diskusi sastra. Karena yang baik dan buruk sangat tergantung dari situasi (diskusi yang paling asyik tidak akan menarik bagi orang yang setengah mati kehausan).

Sejak kurang lebih 30 tahun dibedakan dua macam utilitarisme yang memang cukup berlainan: utilitarisme tindakan dan utilitarisme peraturan.

(96)

a. Utilitarisme Tindakan

Utilitarisme sebagaimana lazimnya difahami adalah utilitarisme tindakan. Kaidahnya dapat dirumus begini: bertindaklah sedemikian rupa sehingga setiap tindakanmu itu menghasilkan suatu kelebihan akibat2 baik didunia yang sebesar mungkin dibandingkan dengan akibatnya yang buruk.

Namun utilitarisme macam itu ternyata makin lama makin disragu sehingga hampir tidak ada lagi yang membelanya. Alasannya bukan hanya bahwa kiranya orang tidak dapat hidup sama sekali tanpa peraturan, bahwa setiap pernyataan moral mengandung unsur bahwa harus diulangi dalam situasi yang sama, walaupun barangkali akibat-akibatnya berlainan. Melainkan sebab pokok dapat dilihat pada contoh ini: seorang ibu mau mencuri beberapa buah blek daging dari toko makanan besar untuk memberikannya kepada seorang gelandangan. Apakah ibu itu boleh berbuat begitu? Mengingat rugi toko besar itu kecil sekali, dilain pihak blek2 itu amat bermanfaat bagi seorang gelandangan, utilitarisme tindakan dapat membenarkan pencurian itu. Tetapi apakah itu dapat diterima? Bukankah ada bahaya bahwa dengan demikian seluruh ketertarikan masyarakat akan goyang?

Atau ambil kasus ini: seorang pegawai sempat untuk melakukan korupsi sebesar 1 juta rupiah. Sekali kerugian satu juta buat negara hampir tidak terasa, jadi ruginya kecil, sedangkan bagi si pegawai itu tambahan satu juta dapat merubah seluruh hidupnya. Jadi, menurut kaidah utilitarisme tindakan korupsi itu dapat dibenarkan. Tetapi apa kita setuju? Bukankah dengan cara demikian segala apa akhirnya dapat dibenarkan? Asal saja rugi yang saya bebaskan tidak terlalu besar dan untung saya sendiri besar sekali, saya boleh merugikan orang lain atau masyarakat? Tujuan menghalalkan alat? Kelihatanlah bahwa utilitarisme itu sangat mirip dengan egoisme.

(97)

b. Utilitarisme peraturan

Untuk meluputkan utilitarisme dari serangan2 itu, kaidahnya diperbaiki. Yang sekarang diperhitungkan bukan lagi akibat baik dan buruk dari masing2 tindakan sendiri, melainkan dari peraturan umum yang mendasari tindakan itu. Jadi yang dipersoalkan sekarang adalah akibat2 baik dan buruk dari suatu peraturan kalau dianggap berlaku umum. Dalam ini kelihatanlah pengaruh Kant. Kant-lah yang menyuruh kita bertanya bagaimana akibatnya seandainya semua orang bertindak menurut kaidah yang mau kita terapkan sendiri. Si utilitaris peraturapun bertanya begitu. Kaidahnya dapat dirumus begini: bertindaklah selalu sesuai dengan kaidah2 yang penetrapannya menghasilkan kelebihan akibat2 baik didunia yang sebesar mungkin dibandingkan dengan akibat2 buruk.

Kalau kaidah ini kita terapkan kepada dua kasus diatas, perbedaannya segera kelihatan. Kita tidak lagi bertanya tentang akibat baik dan buruk daripada suatu tindakan pencurian atau korupsi itu. Melainkan kita bertanya: bagaimanakah akibatnya kalau ada peraturan berlaku begini: "asal demi orang gelandangan boleh saya mencuri dari toko besar", dan "asal untung saya besar sekali dan rugi negara kecil, saya boleh melakukan korupsi". Jelaslah bahwa berlakunya dua peraturan semacam itu akan sangat merugikan seluruh masyarakat, maka dua tindakan itu tidak boleh.

(98)

Akan tetapi, utilitarisme peraturannya tidak luput dari suatu kepincangan yang besar. Mari kita ambil lagi dua contoh: (1) Menurut pengalaman seorang pencopet yang sudah empat kali masuk penjara, pasti akan terus mencopet dan menggangu masyarakat kalau dibebaskan lagi. Maka timbul pertanyaan: bolehkah masyarakat memberikan hukuman penjara seumur hidup bagi pencopet yang ketangkap untuk kelima kalinya? Kalau semua pencopet diperlakukan begitu, tentu pencopetan akan sangat menurun, seluruh masyarakat akan merasa lega, hanya si pencopet akan menggerutu sebagai pencari sebuah arloji saja dibelas dengan penjara seumur hidup. Jadi menurut utilitarisme peraturan tindakan masyarakat semacam itu dapat dibenarkan. Tetapi apakah itu betul? Apakah mayoritas masyarakat pernah berhak untuk, demi keuntungannya sendiri, mencabut hak dari satu orangpun agar hukuman yang diterimakan kepadanya sesuai dengan palanggarannya? Bukankah hak itu mutlak harus dihormati oleh masyarakat? Apakah misalnya suatu golongan agama yang sangat kecil, boleh dimusnahkan demi "ketenteraman masyarakat", berdasarkan dalih (utilitarisme peraturan) bahwa tindakan semacam itu membawa akibat baik yang lebih banyak daripada akibat buruknya bagi masyarakat pada umumnya?

(2) Bagaimana kalau pembangunan masyarakat ada dua kemungkinan? Yang satu mencapai pertambahan produksi nasional (GNP) sebanyak 10% per tahun, tetapi mengandalkannya bahwa hanya golongan kecil masyarakat akan mengeruk untung yang amat besar. Yang satunya mencapai pertambahan GNP sebanyak 5% per tahun, dengan akibatnya bahwa sebagian besar masyarakat mengalami perbaikan kecil. Manakah yang harus dipilih? Menurut Utilitarisme peraturan yang harus dipilih yang pertama karena jumlah seluruh untung lebih besar.

Tetapi, begitu kita bertanya, dimanakah keadilan dalam perhitungan itu.

Dua contoh itu memperlihatkan kelemahan fatal dari setiap bentuk utilitarisme murni: tidak dapat menjamin keadilan dan adanya hak2 azasi yang dengan tujuan apapun juga tidak pernah boleh dilanggar. Keadilan justru berarti: setiap orang terjamin haknya, entah orang lain atau seluruh masyarakat beruntung daripadanya atau tidak. Begitu pula dilakukannya hak2 azasi justru mau menjamin agar ada beberapa hak dasar yang tidak pernah boleh dilanggar, dengan dalih kepentingan umumpun tidak, tanpa kesalahan dari yang bersangkutan. Tetapi karena utilitarisme hanya memperhatikan jumlah akibat baik dan buruk, tetapi tidak memuat peraturan tentang pembagian akibat2 itu, utilitarisme tidak dapat menjamin keadilan.

(99) Banckman:

Istilah-istilah:

Kaidah utilitarisme tindakan: bertindaklah sedemikian rupa sehingga setiap tindakanmu itu menghasilkan suatu kelebihan akibat2 baik didunia yang sebesar mungkin dibandingkan dengan akibat2nya yang buruk.

Kaidah utilitarisme peraturan: bertindaklah selalu sesuai dengan kaidah2 yang penetrapannya menghasilkan kelebihan akibat2 baik didunia yang sebesar mungkin dibandingkan dengan akibat2 buruk.

Keadilan: kewajiban untuk memperlakukan setiap orang secara sama (lihat uraian dibawah).

Hak2 azasi: Hak2 individu yang tidak pernah boleh dilanggar kecuali karena kesalahan orang yang bersangkutan sendiri.

Pernyataan 15:

Utilitarisme peraturan memperbaiki kekurangan kasar dari utilitarisme tindakan, tetapi tidak mencakup sebagai satu2nya kaidah dasar moral karena tidak menjamin keberlakuan mutlak daripada keadilan dan hak2 azasi.

(100) 4. Etika Teonan

Sebelum kami mencoba untuk merumuskan suatu teori normatif yang sedapat-dapatnya menegakkan kelemahan2 dari teori2 yang telah dibicarakan diatas, perlu kami singgung secara singkat pendapat yang berdasarkan norma2 moral pada kehendak Allah. Teori2 itu disebut teonan. (dari Yunani "Theos" = Allah, "nomos" = hukum).

a. Etika teonan murni

a. Etika teologi murni

Kaidah etika ini adalah sbb.: Suatu tindakan adalah betul apabila sesuai dengan kehendak Allah, salah apabila tidak sesuai, wajib apabila diperintahkan Allah. Teori ini adalah sesuai dengan pendapat kebanyakan orang yang beragama dan tidak akan kami bioawakan disini sebagai pondasat agama. Apalagi karena pendapat ini dalam rangka agama memang betul dan tidak mempunyai implikasi etis. Sebagai anggapan agama, kaidah itu dapat difahami baik secara deontologis (Allah menganggap peraturan ini baik) maupun secara utilitaris (Allah menghendaki akibat2 yang baik).

Lain halnya apabila teori itu dikaitkan dengan maksud filsafah untuk menyatakan, bahwa inti kewajiban moral itu kehendak Allah yang bebas. Pendapat ini di Barat dikembangkan oleh William Ockham (1300-1350). Menurut dia Allah itu sama sekali bebas dalam menentukan apa yang harus kita anggap baik dan apa yang harus kita anggap buruk. Memburuk itu tidak terlarang karena jeleknya, melainkan dilarang Allah, dan Allah sebetulnya dapat mewajibkan yang kebalikannya. Dalam abad ini beberapa teolog protestan dari aliran teologi dialektis (Johannes Barth, Paul Brunner) dengan amat tajam mengatakan bahwa Sabda Allah-lah yang menentukan apa yang baik dan apa yang jelek dan bahwa manusia tinggal saja menerima sabda itu, jangan sampai berfikir sendiri karena terhadap Allah Hydronys tak tidak berdaya. Filsuf2 Islam pun condong kearah pendapat ini. Asal sesuatu dianggap penentuan Allah, tidak boleh dipersoalkan lagi apakah masuk akal atau tidak.

Teori ini kelihatan suci sekali tetapi tidak tanpa bahaya juga. Kelemahannya ialah bahwa teori teologi murni tidak dapat memajukan kriterium untuk mengetahui tindakan mana yang sesuai dengan kehendak Allah dan mana yang tidak. Maka orang yang tidak mengakui suatu kitab wahyu ilahi, sama sekali tidak dapat mengetahui bagaimana ia harus bertindak. Pendapat bahwa hanya orang beragama-lah yang akan apakah yang menjadi kewajiban kita bahwa diluar agama tidak ada tanggung-jawab moral, kelihatan agak keterlaluan, tidak sesuai dengan kenyataan dan bertentangan dengan kenyataan. Seakan-akan akal fikiran manusia sama sekali tidak dapat apa2, seakan-akan Tuhan tidak memberikannya juga kepada manusia. Etika teologi murni mengandung bahaya irasionalisme.

Itu menjadi jelas dari kelambatan yang kedua: teori ini membuka pintu lebar2 bagi relativisme moral karena dihalukannya diandaikan bahwa tindakan yang salah dapat saja menjadi betul asal Allah menghendakinya demikian. Pendapat ini menghilangkan keanggunan dan tanggung-jawab moral dan sama sekali tidak menghendaki kewajiban bebas kewajiban moral dan hubungannya dengan apa yang bernilai pada dirinya sendiri (dan tidak hanya merupakan akibat suatu perintah yang semata-mata). Bukankah pendapat, seakan-akan Tuhan dapat saja semau dengan menetapkan yang baik buruk dan yang buruk baik itu berupa penghujatan? Memang, melarang penggunaan pemikiran kritis belum pernah mengutangi dan akhirnya hanya menuruti agama sendiri.

Dapat dicatat bahwa etika teologi murni bersifat deontologis karena tidak memperhatikan akibat2 dari tindakan yang dikatakan diharuskan oleh Tuhan.

b. Teori hukum kodrat

Teori ini adalah etika Thomas Aquinas (1225-1274) yang dalam ini sangat dipengaruhi oleh Aristoteles. Thomas menolak faham tab. diatas, bahwa baik dan buruk ditentukan oleh Allah seakan-akan secara sewenang-wenang. Menurut Thomas, seperti menurut Aristoteles, yang baik itu yang sesuai dengan tujuan manusia, atau dalam istilah Thomas, sesuai dengan hukum kodrat (manusia).

Thomas bertolak dari faham bahwa Allah menciptakan manusia karena ia menghendaki manusia itu agar ada. Maka dari itu, kodrat manusia, justru karena diciptakan oleh Allah, adalah sesuai dengan kehendak Allah. Kita juga dapat mengatakan: kodrat manusia membolehkan kehendak Allah mencipta. Maka manusia tinggal saja bertindak sesuai dengan kodratnya, makaudnya: sesuai dengan apa yang baik baginya, yang menjurus kepada tujuannya yang terakhir, dan ia sekaligus memulid kehendak Allah. Secara singkat etika Thomas dapat dirumuskan dalam kaidah ini: Bertindaklah sesuai dengan kodratmu sebagai manusia, yaitu sempurnakanlah kemampuanmu, dan dengan ini engkau sekaligus akan mencapai kebahagiaan yang sebenarnya serta memenuhi kehendak Allah. Atau: pemulihlah kehendak Allah yang nampak dalam ko-

drat kemanusiaanmu.

Menurut teori ini nilai moral tindakan manusia ditentukan oleh akibatnya, yaitu apakah manusia disempurnakan olehnya, maka termasuk teori teleologis. Sekaligus bersifat eudemonis karena bertindak dengan betul itu berdasarkan pertimbangan bahwa hanya dengan demikian kebahagiaan yang sebenarnya dapat tercapai. Bedanya Thomas dengan Aristoteles ada dua: (1) Thomas menghubungkan kemanusiaan dengan kehendak Tuhan, sehingga orang yang hidup dengan baik sekaligus memenuhi kehendak Tuhan, dan (2) bagi Thomas manusia itu bukanlah makhluk yang tujuan terakhirnya terletak didunia ini: tujuan terakhir manusia adalah menantang Allah, maka ia hanya bertindak sesuai dengan kodratnya apabila ia tidak sama sekali toresapi oleh kedumalwaan. Tetapi dilain pihak berlaku juga: asal manusia hidup sesuai dengan martabatnya, ia sekaligus menuju ketujuannya yang kekal, juga kalau ia tidak mengetahuinya.

Teori hukum kodrat unggul terhadap etika teonom murni oleh karena memberikan norma moral yang dapat diketahui oleh setiap orang (yaitu kemanusiaan, kodrat manusia).

Hal moral disini dihubungkan dengan kepentingan manusia dan masuk akal, serta dapat diketahui juga oleh orang yang tidak beragama, oleh karena setiap orang, lepas dari agamanya, dapat secara garis besar mengerti kemanusiaannya sendiri.

Kelengahan teori Thomas sama dengan setiap eudemonisme, yaitu bahwa pada dasarnya bersifat egois: yang menentukan adalah kepentingan saya sendiri, meskipun kepentingan itu kepentingan saya yang kekal. Selain dari itu faham "kodrat manusia" untuk zaman kita ini sudah terlalu kabur sehingga tak dapat dipakai lagi untuk menentukan apa yang baik bagi manusia.

(102) Rangkuman

Istilah-istilah:

Kaidah Etika Teonom Murni: Suatu tindakan adalah betul apabila sesuai dengan kehendak Allah, salah apabila tidak sesuai, wajib apabila diperintahkan Allah.

Kaidah Teori Hukum Kodrat: bertindaklah sesuai dengan kodratmu sebagai manusia, yaitu sempurnakanlah kemampuanmu, dan dengan ini engkau sekaligus akan mencapai kebahagiaan yang sebenarnya dan memenuhi kehendak Allah.

Hukum kodrat: kemanusiaan manusia sendiri sejauh menjadi norma bagi tindakan manusia dan mencerminkan kehendak Allah.

Pernyataan 16:

- (a) Teori Etika Teonom Murni tidak memecahkan masalah norma dasar moral dan mengundng bahaya irasionalisme dan relativisme moral.
- (b) Teori Hukum Kodrat mengatasi teori etika teonom murni, tetapi tidak mencukupi karena masih bercorak egois, lagi pula faham "kodrat manusia" terlampau kabur.

(103) II. Usul pemecahan masalah norma moral dasar

Seudah kita meninjau teori2 yang sampai sekarang dikemukakan dalam etika normatif, perlu ditarik kesimpulannya. Tetapi kesimpulan bukan dalam arti rangkuman. Melainkan dalam arti bahwa peninjauan pelbagai segi penting dalam masalah norma dasar moral memungkinkan kita untuk mencari suatu pemecahan yang mempertahankan unsur2 positif dari teori2 itu di satu pihak dan mengeslek kelemahan2nya dilain pihak.

Berikut ini kami sajikan usul untuk memecahkan masalah norma dasar moral yang sebagian terbesar mengikuti pendapat William Frankena.

(104) 1. Titik-tolak

Selanjutnya kita mulai dengan meninjau kembali teori2 yang telah dibicair-

rakan diatas. Teori2 egois, yaitu hedonisme dan eudemonisme menunjuk pada beberapa segi penting: Hedonisme menekankan bahwa usaha untuk mencegah rasa sakit serta segi nikmat memainkan peranan yang amat besar dalam motivasi tindak-tanduk kita. Eudemonisme membuka mata kita terhadap keanekaragaman segi kemanusiaan yang perlu diperhatikan supaya manusia dapat bahagia, serta bahwa kebahagiaan manusia itu suatu tujuan syah daripada tindakan moral. Tetapi kedua teori itu tidak mencukupi karena bersifat egois, dan egoisme terlalu sempit sebagai norma dasar moral karena tidak memberi ruang untuk sikap2 yang sungguh2 sosial. Dari situ dapat ditarik kesimpulan, bahwa pemecahan masalah norma dasar meati kita cari diantara teori2 deontologis dan teleologis-universalis (utilitarisme).

Etika Situasi sebagai teori deontologis tindakan mengendang unsur yang hakiki untuk pengertian norma2 moral: norma2 moral kongkrit tidak pernah mencukupi untuk memastikan seratus persen bagaimana orang dalam situasi kongkrit wajib bertindak. Selalu tinggal suatu ruang kebebasan moral didalamnya hanya orang yang bersangkutan dapat menentukan kewajibannya yang kongkrit. Norma2 moral kongkrit tidak lebih dari ancer2 saja. Tetapi etika situasi kalau menolak semua norma. Tanpa peraturan manusia tidak dapat bertindak secara rasional. Adanya norma2 moral (yang lebih) dasar harus diterima.

Dengan demikian faham deontologis peraturan menawarkan diri. Kekakuan faham itu tidak ada lagi apabila kita melihat norma2 moral sebagai kewajiban yang hanya berlaku prima facie. Kelemahan lain faham ini, ialah bahwa tidak diberi petunjuk tentang bagaimana kita dapat memecahkan suatu tabrakan antara dua norma, dapat diatasi kearah yang ditunjuk oleh Kant: norma2 moral dikembalikan kepada satu norma dasar saja dan hanya norma inilah yang berlaku selalu dan dengan mutlak. Namun Kant ternyata tidak berhasil untuk memperlihatkan bagaimana dari satu norma dasar semua norma moral dapat disimpulkan, apalagi norma dasarnya bersifat formal belaka. Kelemahan lain teori deontologis peraturan ialah bahwa sulit diterima bahwa akibat2 suatu tindakan sama sekali tidak ikut menentukan nilai moralnya.

Kalau kita menerima kritik ini, maka kita sudah dapat menarik satu kesimpulan yang pasti: bagaimanapun norma dasar moral akan kita rumus, didalamnya harus termasa kaidah utilitarisme yang dapat juga kami sebut kaidah maksimalisasi-akibat-baik: bertindaklah sedemikian rupa sehingga angka menghasilkan/akibat baik di dunia yang sebesar mungkin, dibandingkan dengan akibat2 buruk yang kau hasilkan. (perhatikanlah bahwa rumusan ini cukup luas untuk memuat baik utilitarisme tindakan maupun peraturan, karena kami akan mengimbangi prinsip utilitarisme ini dengan prinsip lain, distinguishing antara dua bentuk utilitarisme tidak begitu penting lagi).

Akan tetapi, sebagaimana telah kita lihat tak mungkinlah kaidah ini mencukupi sebagai norma dasar moral oleh karena tidak dapat menjamin keadilan. Berdasarkan pertimbangan2 diatas kami usulkan pemecahan masalah norma dasar moral sbb: ada sekurang-kurangnya dua kaidah atau norma dasar yang tidak tergantung satu sama lain: kaidah maksimalisasi-akibat-baik dan kaidah keadilan yang untuk sementara kami rumus begini: bertindaklah selalu dengan adil. Teori kami ini bersifat deontologis. Kami menerima dua kaidah dasar yang berlaku begitu saja, tidak berdasarkan pertimbangan untung-rugi akibat berlakunya. Tetapi sekaligus kelemahan teori2 deontologis yang tradisional diatasi karena salah satu dari dua kaidah dasar (yang keduanya tak pernah boleh dianggap sepi) adalah justru kaidah utilitarisme yang mewajibkan untuk selalu mengusahakan kelebihan akibat baik yang sebanyak mungkin. Kedua kaidah itu sekurang perlu kita tinjau satu satu.

(105) 2. Dua kaidah dasar moral

a. Kaidah sikap-baik

Dengan kaidah maksimalisasi-akibat-baik kami maksud prinsip bahwa kita wajib bertindak sedemikian rupa hingga ada kelebihan maksimal dari akibat baik dibanding dengan akibat buruk. Tetapi jelaslah bahwa kaidah ini hanya berlaku kalau kita menerima kaidah yang lebih dasar lagi, yaitu bahwa kita harus membuat yang baik dan mencegah yang buruk. Hanya berdasarkan kaidah ini kita wajib untuk mengusahakan suatu kelebihan daripada akibat2 yang baik. Bahkan, sebagaimana dicatat Frenken, kaidah maksimalisasi-akibat-baik sudah merupakan suatu kompromi: secara ideal kita hanya menghasilkan akibat2

baik dan sama sekali tidak menghasilkan yang buruk. Tetapi karena itu sering tidak mungkin, sekurang-kurangnya akibat2 buruk harus kita minimalisasikan. Tetapi kewajiban ini tentu sudah mengandaikan kewajiban untuk mencegah yang buruk dan membuat yang baik. Kaidah ini berisi kewajiban prima facie untuk selalu bersikap baik terhadap siapa dan apa saja. Maka akan kami sebut kaidah sikap-baik. Dengan demikian kaidah dasar moral pertama adalah kaidah sikap-baik.

Kaidah sikap baik mendasari semua norma moral. Kita pada dasarnya kecuali kalau ada alasan khusus, mesti bersikap baik terhadap apa saja. Bersikap baik dalam arti: memandang seseorang / sesuatu tidak hanya sejauh berguna bagi saya; menghendaki, menyetujui, membenarkan, mendukung, membela, membiarkan seseorang/sesuatu berkembang demi dia itu sendiri. Bagaimana sikap baik itu harus dinyatakan secara kongkrit tergantung dari apa yang baik dalam situasi kongkrit itu. Maka kaidah ini menuntut suatu pengetahuan tepat tentang realita supaya diketahui apa yang masing2 baik dalam setiap situasi. Kalau itu sudah kita ketahui, kita tahu juga bagaimana kaidah sikap baik mesti kita terapkan dalam situasi ini.

Juga norma2 yang lebih umum dapat disimpulkan dari kaidah ini. Atas dasar kenyataan, bahwa mengerti kenyataan itu sesuatu yang baik, kaidah sikap baik menginginkan misalnya kesimpulan bahwa kita wajib prima facie untuk bicara yang benar. Lain2 kaidah kewajiban prima facie yang dapat ditarik dari kaidah sikap-baik adalah misalnya kaidah maksimalisasi-akibat-baik, kaidah bahwa kita tak boleh merugikan orang lain, kaidah bahwa kita wajib menghormati kebebasan orang lain.

Juga kaidah keadilan mengandaikan kaidah sikap-baik: seandainya tak ada kewajiban untuk bersikap baik tentu saja tak ada kewajiban juga untuk memperlakukan orang lain secara adil. Namun, dan itu yang menentukan disini, walaupun kaidah keadilan mengandaikan kaidah sikap baik, tak tidak dapat disimpulkan daripadanya. Karena kaidah sikap-baik tidak mengatakan apa2 tentang bagaimana kebaikan itu harus dibagikan. Jadi kaidah sikap baik adalah syarat perlu tetapi bukan syarat secukupnya dari kaidah keadilan.

(106)

b. Kaidah keadilan

Tak mungkinlah kita membicarakan masalah keadilan disini dengan panjang lebar. Terpaka kami membatasi diri pada segi pokok keadilan sejauh perlu dalam rangka pembicaraan ini.

Keadilan yang kita bicarakan adalah keadilan dalam membagikan yang baik dan yang buruk. Untuk mengerti apa yang dimaksud dengan adil, kita dapat bertolak dari apa yang jelas kita anggap tidak adil: kita bicara tentang ketidakadilan apabila dari dua orang yang sifatnya cukup mirip dan yang berada dalam situasi yang mirip juga, yang satu diperlakukan dengan lebih baik atau dengan lebih buruk daripada yang satunya. Ketidakadilan terdiri dalam perlakuan yang tidak sama. Maka kita dapat bertolak dari penentuan keadilan sebagai kewajiban prima facie untuk memberi perlakuan yang sama terhadap orang lain. Apa artinya perlakuan yang sama dan manakah unsur2 yang membenarkan perlakuan yang tidak sama? Kiranya jelas bahwa perbedaan ketinggian badan atau perbedaan ras tidak memberi hak untuk diterimakan perlakuan yang berbeda kepada mereka. Ciri2 itu tidak relevant secara moral. Tetapi ciri2 manakah yang relevant dalam rangka pertimbangan moral? Dengan mengikuti Aristoteles kami berpendapat bahwa ciri-ciri yang relevant adalah ciri2 yang mempengaruhi kebahagiaan manusia. Hal itu kiranya juga dapat disimpulkan dari kaidah sikap-baik, mengingat yang baik bagi orang lain adalah selalu yang betul2 membahagiakannya. Ciri2 yang paling mempengaruhi kebahagiaan orang adalah kemampuan2 dan kebutuhannya. Maka perbedaan dalam kemampuan dan kebutuhan2 orang adalah ciri2 yang dapat membenarkan suatu perlakuan yang berbeda juga. Atau dengan lain kata, dalam menentukan apa yang dimaksud dengan perlakuan yang sama, kemampuan2 dan kebutuhan2 harus diperhatikan.

Berdasarkan pertimbangan2 ini kami dapat memberi penentuan yang lebih terperinci: memberi perlakuan yang sama kepada orang lain berarti: (1) memberi sumbangan yang relatif sama terhadap kebahagiaan mereka, diukur pada kebutuhan mereka, dan (2) menuntut dari mereka pengorbanan yang relatif sama, diukur pada kemampuan mereka. Jadi kesamaan sumbangan kearah kebahagiaan orang lain tidak dimaksud dalam arti sama rata melainkan kesamaan itu ditentukan dengan melihat kebutuhan orang itu; kesamaan beban yang terpaksa harus

dipikulkan kepada segenap anggota masyarakat harus sama dengan memperhatikan kemampuan masing2 anggota itu.

Tentu saja keadilan tidak menuntut agar kita membuat semua orang lain sama-sama bahagia. Kebahagiaan orang lain tidak dapat kita paksaakan melainkan tergantung dari orang itu sendiri. Ada orang yang se-akan2 tidak pernah dapat bahagia. Kita hanya dapat menyumbang menciptakan syarat2 agar orang lain dapat bahagia.

Kami dapat merangum bahwa kaidah keadilan mengandung kewajiban untuk memberi perlakuan yang sama kepada semua orang dalam pembagian daripada yang baik dan yang buruk, dalam pemberian bantuan, tugas2 dan fungsi2 sosial, dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan mereka. Kewajiban ini hanya mengizinkan kekecualian apabila perlakuan yang tak sama dapat dibenarkan berdasarkan kaidah-sikap-baik atau karena dalam jangka panjang akan menghasilkan kesamaan yang lebih besar. Pokoknya, setiap perlakuan yang tidak sama menuntut pertanggung-jawaban khusus.

(107) 3. Penentuan-penentuan lebih lanjut

Dasar kaidah yang dibicarakan diatas, merupakan kaidah dasar moral. Kedua-duanya berdiri sendiri. Walaupun kaidah keadilan mengandung kaidah sikap-baik, namun tidak dapat dikembalikan kepadanya. Bahwa memang demikian adanya kantaralah dari perbandingan lingkup dan kaidah itu. Kaidah sikap-baik rupa-rupanya berlaku bagi segenap mahluk yang ada, tidak hanya bagi manusia. Terhadap binatang dan tumbuh-tumbuhanpun kita dengan sendirinya diharapkan bersikap baik. Tentu saja, dunia bukan manusia boleh saja dimanfaatkan demi manusia. Prinsip sikap-baik pun berlaku prima facie, maka tidak perlu kita bersikap baik terhadap alam apabila sikap itu bertabrakan dengan kepentingan manusia. Tetapi menyiksa binatang tanpa alasan yang masuk akal, misalnya hanya karena orang senang berbuat demikian, secara moral dianggap tidak beres. Bahkan terhadap tumbuhan ada sesuatu yang analog dengan kewajiban. Bayangkan seseorang yang berhadapan dengan sebatang bunga angrek ditengah2 hutan. Kalau ia merusakkannya tak ada manusia lain yang akan rugi. Namun, seandainya tak ada maksud ilmiah tertentu dan tak ada pula maksud untuk membawanya pulang kerumah, andaikata orang tidak pula marah2 dan perlu melepaskan agresinya (yang lebih wajar kalau dilepaskan terhadap sebatang bunga daripada terhadap orang lain) dan tidak ada dorongan untuk main-main, seperti misalnya kita memanggul bunga2 dengan tongkat, jadi andaikata tak ada alasan sedikitpun untuk menghancurkan dan juga untuk tidak menghancurkannya, bukankah kita akan mengharapkan agar bunga angrek itu dibiarkan berkembang terus? Bukankah kita akan mendapat kesan kurang baik kalau orang itu menghancurkannya juga? Jadi rupa2nya prinsip sikap-baik berlaku terhadap apa saja yang ada, tentu saja sesuai dengan kedudukannya dalam dunia manusia.

Tetapi kaidah keadilan hanya berlaku bagi manusia saja. Kita dapat mengharapkan agar orang bersikap baik terhadap seekor anjing tetapi tidak agar ia bersikap adil terhadapnya. Tak masuk akal sama terhadap binatang tidak dianggap apa2, asal jangan sampai melanggar kaidah sikap-baik. Jadi keadilan hanya dapat dituntut terhadap manusia. Dan terhadap segala mahluk yang berakal-budi. Seandainya alat2 negara menangkap seorang "manusia" Mars karena dia mengganggu penduduk2 kota, manusia Mars itu tentu berhak atas perlakuan yang adil dan pengadilan yang wajar.

Jadi antara dua kaidah itu memang ada perbedaan hakiki: kaidah sikap-baik berlaku terhadap apa saja yang ada, kaidah keadilan hanya terhadap mahluk yang berakal budi.

(108) Dengan adanya dua kaidah dasar moral yang berdiri sendiri, harapan Kant bahwa semua norma moral dapat disimpulkan dari satu norma dasar saja tidak terpenuhi. Dengan demikian jelaslah bahwa dua kaidah itu berlaku prima facie. Apabila kedua kaidah itu menuntut tindakan yang bertentangan, tidak lagi dapat ditentukan secara apriori manakah kewajiban sungguh2 bagi orang yang bersangkutan. Akan tetapi, suatu pertentangan yang langsung antara dua kaidah itu kiranya jarang dapat terjadi. Biasanya penerapannya dari kaidah yang satu dibatasi oleh yang satunya. Jadi kalau kewajiban moral tidak disimpulkan dari kedua-duanya melainkan dari satu kaidah dasar saja, kaidah dasar yang satunya berfungsi sebagai syarat yang tak boleh dilanggar.

Itu berlaku terutama terhadap penggunaan kaidah sikap baik. Kaidah ini

selalu hanya boleh dipakai sejauh tidak melanggar keadilan. Jadi saya hanya boleh memberi upah yang lebih baik kepada seorang buruh saya kalau dengan demikian upah buruh2 lainnya tidak dikurangi. Saya boleh membantu orang meekin, tetapi tidak dengan jalah mencuri (dalam masyarakat yang keteraturannya dibangun diatas pengakuan hak milik, mencuri berarti melanggar keadilan). Sedangkan kaidah keadilan jarang akan harus dibatasi oleh kaidah sikap-baik karena penerapan kaidah keadilan dengan sendirinya merupakan pelaksanaan dari sikap yang baik.

Semua kaidah moral lainnya dapat disimpulkan dari satu kaidah dasar atau dari kedua-duanya itu. Kaidah2 itupun serta kewajiban2 kongkrit yang disimpulkan daripadanya, hanya berlaku prima facie dan tak pernah langsung mewajibkan dengan mutlak. Untuk mengetrapkan kaidah sikap baik, kita harus mengetahui apa yang baik dan apa yang buruk dalam situasi itu bagi semua orang yang tersangkut. Tetapi tentang apa yang baik dan apa yang buruk bagi seseorang tertentu, tak pernah ada pengetahuan yang seratus persen. Maka penerapan kaidah sikap-baik tak dapat dipastikan seratus persen pula, alias hanya berlaku prima facie. Hal yang sama berlaku bagi penerapan kongkrit daripada keadilan. Untuk itu kita harus mengetahui kebutuhan2 dan kemampuan2 orang yang bersangkutan. Tentang unsur2 itupun suatu pengetahuan yang pasti tidak mungkin.

(109) 4. Dasar kaidah-kaidah dasar

Bahwa dua kaidah dasar moral tidak lagi dapat disimpulkan dari kaidah yang lebih mendasari lagi dan bahwa oleh karena itu dua kaidah itu memang kaidah yang paling dasar, tidak perlu diulang-ulang. Tetapi itu tidak berarti bahwa dua kaidah itu tidak mempunyai suatu dasar. Namun masalah dasar kaidah-kaidah dasar akan membawa kita jauh keluar dari bidang etika masuk kedalam filsafat manusia dan bahkan kedalam metafisika. Oleh karena itu kami membatasi diri pada beberapa catatan saja.

Dalam pembicaraan tentang rasionalita kesadaran moral kita melihat bahwa kesadaran akan adanya kewajiban disertai oleh suatu keinsyafan yang sekaligus kuat dan samar2 bahwa apa yang diwajibkan itu baik, indah dan pantas disetujui. Kelihatanlah bahwa kewajiban itu tidak dapat dimengerti pada dirinya sendiri saja. Kewajiban itu akhirnya bermakna subsidier (= berfungsi untuk mencapai tujuan lain) terhadap apa yang bernilai. Dasar adanya kewajiban adalah apa yang bernilai pada dirinya sendiri dalam arti bahwa adanya kewajiban itu demi pelaksanaan nilai itu.

Apabila kita memperhatikan kesadaran moral kita (jadi kita kembali ke metode fenomenologis), kelihatanlah bahwa dua kaidah dasar pun tidak menjangkau diudara kosong, tidak merupakan sesuatu yang tinggal kita terima saja. Melainkan akan kita setuju karena dalam menjalankan kedua kewajiban dasar itu, kita melaksanakan sesuatu yang bernilai pada dirinya sendiri.

Rupa-rupanya kaidah sikap-baik berdasarkan kesadaran bahwa apa saja yang ada, karena adanya itu saja, pantas kita dukung, kita sajikan, kita beri kesempatan untuk berkembang, pendek kata, bahwa apa saja yang ada pantas agar kita bersikap baik terhadapnya. Ada banyak sekali alasan untuk tidak bersikap baik terhadap sesuatu. Tetapi kalau alasan2 khusus tidak ada, bukankah orang lain, dan binatang, kucing, pohon kelapa, intan berlian, buaya disungai, dan pisang dan sapi diperlakukan pantas semua agar kita bersikap baik terhadap mereka?

Kita disini menyadari sesuatu yang amat mendasar. Apa saja yang ada dengan demikian pantas disetujui, baik dan mengembirakan. Filsafat Hindu yang menghormati hak hidup segenap makhluk, Platon yang menganggap yang Baik sebagai ide tertinggi dan ikatan kesatuan ide2, filsafat Skolastik yang mengajar, bahwa apa yang ada sejauh adanya, benar dan baik, dan banyak aliran filsafat lainnya sudah akan kenyataan itu.

Kaidah keadilan rupanya mengarah kepelaksanaan suatu nilai yang lain: kita ingat bahwa kaidah itu hanya berlaku bagi makhluk yang berakal-budi dan bahwa fungsinya ialah menjamin agar satu orangpun jangan sampai dirampas halnya demi keuntungan orang lain ataupun seluruh masyarakat. Nilai yang mau dijamin oleh kaidah keadilan adalah nilai tak terhingga dari setiap makhluk yang berakal-budi, dari setiap orang manusia sebagai person. Kant merumuskan imperatif kategorinya juga begini: Perlakukanlah setiap person sebagai tujuan pada dirinya sendiri. Setiap orang, sebagai makhluk yang berakal-budi, merupakan tujuan pada dirinya sendiri. Tidak pernah ia boleh dipergunakan melulu sebagai alat saja.

Tidak ada nilai apapun yang lebih besar dari nilai setiap orang manusia, sehingga demi nilai itu kita akan berhak untuk mengorbankan seorang manusia saja. Itulah sebabnya hak yang nyata dari seseorang tak boleh dikorbankan demi keuntungan seluruh masyarakat lainnya, dan mengapa pendekatan utilitaris menemukan batasanya pada hak setiap orang.

Kami rangkum: dalam pandangan kami dua kaidah dasar moral baru difahami sungguh2 apabila tidak dilihat sebagai sesuatu yang diwajibkan kepada kita entah karena apa, melainkan sebagai jaminan pelaksanaan dari dua nilai yang berangkal paling tinggi dan paling fundamental: nilai dari apa saja yang ada dan nilai tak terhingga dari setiap makhluk berakal-budi.

(110) 5. Rangkuman

Istilah-istilah:

Kaidah dasar moral: kaidah yang mendasari berlakunya kaidah2 dan kewajiban2 moral lainnya dan sendiri tidak berdasarkan kaidah lain lagi.

Kaidah maksimalisasi-akibat-baik: Bertindaklah sedemikian rupa sehingga engkau menghasilkan kelebihan akibat baik didunia yang sebesar mungkin, dibandingkan dengan akibat2 buruk yang kauhasilkan.

Kaidah sikap-baik: buatlah yang baik dan cegahlah yang buruk.

Kaidah keadilan: berilah perlakuan yang sama kepada orang lain.

Perlakuan yang sama: memberi sumbangan yang relatif sama terhadap kebahagiaan orang lain, diukur pada kebutuhan masing2 orang; dan menuntut dari orang lain pengorbanan yang relatif sama, diukur pada kemampuannya.

norma berdasarkan kaidah: norma itu secara logis dapat disimpulkan dari kaidah itu dan dari salah satu fakta empiris.

kaidah mengakui nilai: dalam kesadaran akan kaidah itu terkandung kesadaran bahwa melaksanakan kaidah itu baik, dan baiknya itu terdiri dalam nilai tersebut.

nilai dari apa saja yang ada: apa saja yang ada, asal saja ada, dengan sendirinya pantas disetujui, didukung, dipertahankan, diberi kesempatan untuk berkembang.

nilai tak terhingga dari setiap makhluk berakal-budi: setiap makhluk berakal-budi adalah tujuan pada dirinya sendiri, tidak pernah boleh dipakai hanya sebagai alat saja untuk mencapai tujuan lain; nilainya disebut tak terhingga, karena nilai apapun tidak mencukupi hingga makhluk berakal-budi ataupun berhak dikorbankan.

sikap realis (lih. nr. berikut): bertindak dengan baik dan adil menuntut agar diperhatikan orang yang nyata, dengan kebutuhan2 dan kemampuan2nya yang nyata, dalam keadaannya yang nyata.

sikap kritis (lih.nr. berikut): keadaan yang ada dinilai dari segi dua kaidah dasar moral dan, sejauh tidak sesuai, diubah/diperbaiki.

Pernyataan 17:

- a. Dua kaidah dasar moral adalah kaidah sikap-baik dan kaidah keadilan. Semua norma moral lainnya hanya berlaku sejauh berdasarkan salah-satu kaidah itu atau kedua-duanya.
- b. Kaidah sikap-baik mengakui nilai dari apa saja yang ada, kaidah keadilan mengakui nilai tak terhingga dari setiap makhluk berakal-budi.
- c. Sikap moral yang tepat adalah sekaligus realis dan kritis.

(111)

P o n o t a t u r

Peninjauan teori2 normatif menghasilkan pengertian bahwa dibelakang begitu banyak peraturan dan kewajiban moral akhirnya hanya ada dua kewajiban dasar saja, yaitu kewajiban untuk berakap baik terhadap siapa dan apa

saja dan kewajiban untuk memperlakukan setiap orang dengan adil. Dengan demikian kentarah bahwa bidang moral sebetulnya bukan suatu kekeuasaan norma2 dan peraturan2 yang mau membalengka kebebasan kita melainkan merupakan medan tanggung-jawab kita sebagai manusia. Akhirnya yang penting hanyalah dua, yaitu agar kita mendukung dan menghormati satu sama lain sebagai mahluk yang bernilai pada dirinya sendiri.

Apa arti dukungan dan hormat itu dalam praktek kongkrit tidak dapat dihiap dari udara melainkan tergantung dari orang2 kongkrit yang bersangkutan bersama masyarakatnya. Bukan si "manusia" yang kita hormati, melainkan pelbagai orang yang berada dalam jangkauan pengaruh tindakan2 kita, dengan kebutuhan2 dan kemampuan2nya, dengan kelenahan2 dan harapan2nya. Terhadap mereka itu kita dipanggil untuk bertanggung-jawab.

Dan karena orang2 itu orang yang real dalam dunia yang real pula, tanggung-jawab kita harus real juga. Kita wajib membuka mata lebar2 terhadap realita. Tanggung-jawab moral menuntut sikap yang realis. Siapa yang selalu bertindak menurut "cita-cita luhur" berada dalam bahaya akan mengorbankan orang yang nyata demi cita-citanya. Cita-cita luhur dapat menjadi kedok untuk melarikan diri dari tanggung-jawab yang nyata.

Apa yang menjadi kebutuhan orang dan masyarakat yang real hanya dapat diketahui dari realita itu sendiri. Teori moral hanya mengedikan dua kaidah dasar. Segala norma lainnya kurang lebih hanya merupakan contoh bagaimana kaidah2 dasar itu kiranya dapat diterapkan kepada realita. Sebagai cetusan pengalaman masyarakat norma itu perlu diperhatikan tetapi tidak langsung diangkat dengan mutlak. Kewajiban2 yang kongkrit tak dapat diketahui hanya dari buku etika, dari daftar kewajiban dalam buku2 agama, dari peragaan sucinya sendiri, dari penentuan penguasa atau atas dasar ilham2 yang khusus. Tak ada jalan lain kecuali membuka mata terhadap orang2 yang nyata.

Tetapi sikap realis tidak berarti bahwa kita menerima realita begitu saja. Kita membalajari keadaan dengan seralis-realisnya supaya dapat kita sesuaikan dengan tuntutan norma dasar. Dengan lain kata, sikap realis mesti berbarengan dengan sikap kritis. Tanggung-jawab moral menuntut agar kita terus menerus memperbaiki apa yang ada supaya lebih adil dan supaya orang2 dapat lebih bahagia. Kaidah2 moral dasar adalah norma kritis yang kita letakkan pada keadaan.

Sikap kritis perlu juga terhadap segala macam kekuatan, kekuasaan dan otorita didalam masyarakat. Kita tidak tunduk begitu saja, kita tidak dapat dan tidak boleh menyerahkan tanggung-jawab kita kepada mereka. Penggunaan setiap wawang harus sesuai dengan keadilan dan bertujuan untuk menciptakan syarat2 agar semakin banyak orang dapat lebih bahagia. Diluar tujuan itu otorita mereka berhenti. Begitu pula segala macam peraturan moral tradisional perlu disaring dengan kritis. Tujuan peraturan2 itu pernah untuk menjamin keadilan dan mengarahkan hidup masyarakat kepada kebahagiaan. Tetapi apakah sekarang masih berfungsi demikian atautah telah menjadi alat untuk mempertahankan keadaan yang justru tidak adil dan malahan membawa penderitaan?

Tanggung-jawab moral yang nyata menuntut sikap realis dan kritis. Pedoman yang yalah untuk menjamin keadilan dan menciptakan suatu keadaan masyarakat yang membuka kemungkinan lebih besar bagi anggota2nya untuk membangun hidup yang lebih bebas dari penderitaan dan lebih bahagia.

Daftar istilah

Angka dibelakang kata menunjuk ke nomor pinggiran, angka yang digarisbawahi menunjukkan tempat definisi.

- agresi, 65
- amoral, 4
- asusila 4
- baik, 27
- bernilai pada dirinya sendiri, 27
- deontologis, teori etika normatif -, 75, 83, 86
- deontologis peraturan, teori etika normatif --, 83, 83-90, 91, 104
- deontologis tindakan, teori etika normatif --, 84, 85, 104
- dosa dalam pikiran, 45
- Ego, 56, 60, 63
- egoisme etis, 75, 76, 82, 104
- emotivisme, 36
- eros, 65
- etika, 4
- etika nilai, 93
- etika situasi, 83, 84, 85, 86, 104
- etika tecnon, 100
- etika tecnon murni, 100, 102
- lihat juga: metode etika
 metaetika.
- audenonisme, 75, 79, 82, 104
- fenomen kesadaran moral, 13
- fenomenologis, metode -, 5
- formalisme Kant, 92
- guilt society, 64
- hak2 azasi, 98, 99
- hedonisme, 75, 76, (78), 104
- hedonisme etis; lih. hedonisme
- hedonisme egois, 78
- hedonisme psikologis, 77, 78
- heteronomi, 51
- Hindu, filsafat - , 109
- hakun kodrat, 101, 102
- Id, 56, 63
- Ideal Ego, 56, 59, 63
- ideologi, 41
- imperatif hipotetis, 17
- imperatif kategoris, 17, 92, 109
- Isian, 100
- kaidah dasar moral, 104, -107, 110
- kaidah kondilan, 104, 105, 106, 110
- kaidah maksimalisasi-akibat-baik, 104, 105, 110
- kaidah sikap-baik, 105, 110
- kondilan, 99, 106 --
- kebebasan, 39 s/d 55, 47 --
- kebebasan, maknanya, 50, 55
- kebebasan, faham negatif, 42, 47
- kebebasan, faham positif, 43
- kebebasan jasmaniah, 44, 47
- kebebasan kehendak, 45, 47
- kebebasan moral dalam arti luas, 46, 47
- kebebasan moral dalam arti sempit, 46, 47
- keuntungan, 69
- keputusan dasar, 88
- kesadaran nilai, 26
- kewajiban moral, 17, 20
- legalisme, 31
- libido, 65
- Logical Positivisme, 36
- maksud baik, 33

malu, 64
 "manusia" Mars, 107
 menguniversalisasikan, 27
 menilai orang lain, 32
 metaetika, 5 -
 metode analitis, 5 -
 metode empiris-deskriptif, 5
 metode etika, 5 -
 metode fenomenologis, 5 -
 metode normatif, 5 -
 moral point of view, 25
 mutlak, 17, 20 -
 nilai, 27
 (ber)nilai pada dirinya sendiri, 27
 norma, 7, 10
 norma hukum, 8, 10
 norma kalakuan, 10
 norma moral, 8, 9, 10
 norma moral dasar, 34, 82, 84, 86
 norma moral individual, 84, 86
 norma moral kongkrit, 34, 84, 86
 norma moral umum, 84, 86 -
 norma sopan-santun, 8, 10
 normatif, -teori etika - , 75
 Oedipus, kompleks - , 65
 otonomi, 52
 penentuan diri manusia, 67-69
 penilaian bukan moral, 6
 penilaian moral, 6
 pernyataan kewajiban, 6
 preskriptivisme, 37
 prima facie, berlaku - - , 90, 91
 rasa bersalah, 64
 rasa malu, 64
 rasionalis, 3
 rasional, 3
 rasionalita, 27
 rasionalita kesadaran moral, 22
 rasionalita suara batin, 27
 relativisme deskriptif, 34
 relativisme metaetis (34)
 relativisme moral, 34 -
 relativisme normatif, 34, 35
 shane society, 64
 Skolastik, filsafat - , 109
 sikap kritis, 110, 111
 sikap realis, 110, 111
 suara batin, 51, 52, 61, 62, 20
 suara batin - selalu-harus ditaati?, 28
 superego, 56, 57, 58, 63
 susila, 4 - -
 tanggung-jawab, 54, 55
 teleologis, teori etika-normatif - , 75, 78
 teori etika normatif, 75 -
 teori etika normatif deontologis, 75, 83, 86
 teori etika normatif teleologis, 75, 78
 teori hukum kodrat, 101, 102
 thanatos, 65, -
 tindakan, 47, 50 -
 titik-pangkal moral, 25
 transendensi manusia, 70
 (meng)universalisasikan, 27
 utilitarisme, 75, 94 a/d 99, 104
 utilitarisme peraturan, 97, 98, 99
 utilitarisme tindakan, 96, 99
 wajib, 17, 20

D a f t a r N a m e

Aristippos, 77
Aristoteles, 53, 68, 77, 79, 80, 81, 101, 106
Ayer, A.J., 36
Baier, K., 25
Barth, K., 100
Bentham, J., 95
Brunner, B., 100
Carnap, R., 36
Epikorus, 77
Fletscher, J., 85, 87
Frankena, W., 103, 105
Freud, S., 56, 58, 65, 77
Hare, R.M., 38
Hartman, H., 93
Hegel, G.W.F., 79, 92
von Hildebrand, D., 93
Hume, D., 36
Husserl, E., 93
Hutcheson, 36
Kant, I., 17, 52, 89, 92, 97, 104, 108, 109
Lorenz, K., 34
Marx, K., 79
Mill, J. St., 95
Nietzsche, F. (35), 66
Ockham, W., 100
Platon, 109
Ross, W.D., 90
Rousseau, J.J., 43
Shaftesbury, 36
Scheler, H., 93
Schlick, M., 77
Stevenson, C.L., 37
Thomas Aquinas, 9, 79, 101

Pertanyaan-pertanyaan untuk mempelajari diktat Etika Umum

I. Tentang Pendahuluan (hal. 1-4):

1. Apa yang dimaksud dengan "hidup kita terentang dalam suatu jaringan norma-norma"?
2. Sebutkan beberapa norma yang membatasi kemungkinan kelakuan kita!
3. Apa itu "etika", "bidang moral", apakah perbedaan antara dua istilah itu? Apa yang dimaksud dengan "fakta moral"? Berilah contoh sebuah fakta moral!
4. Dalam arti apa etika bersifat kritis?
5. Dalam arti apa etika membantu kita untuk bersikap rasional dan otonom?
6. Terangkan perbedaan antara:
 - a. Pernyataan empiris-deskriptif dan pernyataan normatif;
 - b. Pernyataan kewajiban, penilaian moral dan penilaian bukan moral.
7. Bagaimanakah perbedaan dalam pelaksanaan pasangan kata "baik - buruk" dan "betul - salah"?
8. Manakah perbedaan antara pendekatan empiris-deskriptif, fenomenologis, normatif dan metaetis terhadap suatu fakta moral? Pendekatan mana yang termasuk tugas etika?

II. Tentang macam-macam norma kelakuan (4-6):

1. Apakah perbedaan antara norma-norma sopan-santun, hukum dan moral?
2. Apakah yang menjadi kekhususan norma-norma moral?
3. Bagaimanakah kita dapat mengetahui sebuah norma termasuk yang mana?

III. Tentang fenomena kesadaran moral (7-8)

1. Apa yang dimaksud dengan kata "fenomena"?
2. Apa itu fenomena kesadaran moral?
3. Mengapa kekhususan norma-norma moral hanya dapat diketahui dari analisa fenomena kesadaran moral?
4. Dalam contoh tentang 100 Rupiah itu, manakah perbedaan antara keinginan saya dan kesadaran moral saya?
5. Dalam arti apa kesadaran itu bersifat mutlak?
6. Apakah sifat mutlak itu berarti bahwa kesadaran itu pasti betul?
7. Dalam arti apa saya sadar bahwa kewajiban itu berlaku untuk setiap orang?
8. Dalam arti apa saya sadari bahwa kewajiban itu masuk akal?
9. Mengapa keputusan itu merupakan tanggung-jawab saya?
10. Dalam arti apa nilai saya sendiri tergantung dari keputusan itu?

IV. Kemutlakan suara batin (hal. 9)

1. Apa itu "wajib"? Dapatkah didefinisikan?
2. Apa kekhususan kewajiban moral dibanding dengan kewajiban lain-lain?
3. Apa arti kata "mutlak"?
4. Apa artinya "kewajiban moral bersifat mutlak"?
5. Terangkan distingsi Kant tentang imperatif hipotitis dan kategoris!
6. Apa itu suara batin? Mengapa disebut suara?
7. Apa yang menjadi kekhususan norma-norma moral?
8. Mengapa suara batin disebut tempat duduk otonomi manusia?
9. Mengapa suara batin dengan sendirinya harus ditaati?
10. Mengapa semua perintah dari lembaga masyarakat apapun (sebutlah beberapa lembaga!) hanya mewajibkan sejauh sesuai dengan suara batin?

V. Rasionalita kesadaran moral (hal. 10)

1. Apa yang dimaksud dengan "rasionalita kesadaran moral"?
2. Dalam arti apa kewajiban moral berlaku umum?
3. Apakah dengan demikian sudah pasti bahwa pendapat saya betul dan berlaku umum?
4. Mengertikah saudara distingsi antara "kewajiban ini dalam kesadaran saya berlaku umum", dan "kewajiban ini berlaku umum"? Dalam fasal ini mana yang dibicarakan?
5. Apa perbedaan antara keyakinan moral dan suatu perasaan?
6. Bagaimana rasionalita kesadaran moral dapat diperlihatkan?
7. Mengapa kesatuan pendapat sering tidak tercapai?
8. Apa yang dimaksud dengan "the moral point of view"?
9. Apa hubungan antara kewajiban moral dan kesadaran nilai?
10. Apa hubungan antara kesadaran nilai dan rasionalita kesadaran moral?

VI. Menaati suara batin? (hal. 12)

1. Mengapa nampaknya ada pertentangan antara kemutlakan dan rasionalita kesadaran moral dan bagaimana pertentangan itu dipecahkan?
2. Apa artinya "mencari apa yang betul secara obyektif"?
3. Apa artinya "suara batin harus dididik" dan mengapa harus?
4. Apakah suara batin yang keliru pun mutlak wajib ditaati?
5. Kalau kesadaran moral (apa itu?) tergantung juga dari informasi-informasi yang saya dapat dan bisa berubah apabila saya mendapat informasi lain, apakah masih dapat disebut "mutlak"?

VII. Sikap-sikap moral yang tidak mencukupi (hal. 13)

1. Apa yang dimaksud dengan legalisme dan mengapa tidak mencukupi sebagai sikap moral?
2. Mengapa tidak boleh menjatuhkan penilaian moral pada orang lain berdasarkan tindakan lahiriahnya?
3. Mengapa sikap "seal makudnya baik" tidak mencukupi?

VIII. Relativisme moral (hal. 14)

1. Apa itu relativisme moral?
2. Apa itu relativisme deskriptif?
3. Apa kiranya relativisme (deskriptif) yang moderat?
4. Apakah kesan pertama dari hasil-hasil antropologi itu lebih condong ke relativisme moral atau ke faham kesatuan norma-norma di seluruh dunia?
5. Bagaimana relativisme moral dapat ditolak padahal kelihatan sesuai dengan kenyataan (dengan kenyataan apa?)?
6. Apa yang dimaksud dengan relativisme normatif dan di mana perbedaannya dari relativisme deskriptif?

IX. Emotivisme dan Preskriptivisme (hal. 17)

1. Apa itu "Logical Positivisme"?
2. Apa itu "emotivisme"?
3. Mengapa kaum emotivis berpendapat, bahwa pendapat-pendapat moral hanya mengungkapkan perasaan saja?
4. Mengapa kita keberatan dengan anggapan emotivisme?
5. Apa perbedaan antara suatu pernyataan dan suatu perasaan?
(lih. juga buku "ETIKA UMUM" hal. 27a).
6. Bagaimana pendapat Stevenson?
7. Di mana letaknya kekurangan pendapat Stevenson?
8. Apa yang dimaksud oleh Hare dengan "standart" dan dengan "laporan"?
9. Mengapa teori Hare disebut preskriptivisme?
10. Di mana letaknya kekurangan teori Hare?

X. Kebebasan (hal. 19)

1. Apa arti kalimat "orang ini bebas"?
2. Apa arti "Kebebasan", ditentukan secara negatif?
3. Apa yang dapat dimaksud dengan "kebebasan" kalau mau ditentukan secara positif?
4. Mengapa penentuan arti istilah "kebebasan" harus negatif, tidak boleh positif?
5. Apa yang dimaksud dengan kebebasan jasmaniah, kehendak dan moral?
6. Bagaimana hubungan antara tiga macam kebebasan itu?

XI. Kebebasan dan kesadaran moral (hal. 24)

1. Kebebasan yang mana diandaikan oleh adanya kewajiban moral?
2. Mengapa kebebasan dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menentukan dirinya sendiri?
3. Apa yang dimaksud dengan sikap otonom terhadap kewajiban?
4. Apa yang dimaksud dengan sikap heteronom terhadap kewajiban?
5. Mengapa dalam sikap otonom terhadap kewajiban martabat manusia sebagai makhluk bebas mencapai puncaknya?
6. Dalam diri apa manusia dalam setiap keputusan moral membangun dirinya sendiri?

XII. Struktur kesadaran moral (hal. 30)

1. Fenomen apa dalam kesadaran manusia dimaksud oleh Freud dengan istilah-istilah "Ich", "Ego", "Superego"?
2. Bagaimana superego itu terjadi?
3. Apa bedanya antara superego dan "ideal ego"?
4. Apakah suara batin sama dengan superego?
5. Mengapa inti kesadaran moral terletak dalam Ego?
6. Apa fungsi dan guna Superego yang sehat.
7. Bagaimanakah kesadaran moral otonom dan heteronom berbeda dilihat dari segi Superego?

XIII. Tentang Etika Normatif (hal. 44 - 46)

1. Di manakah perbedaan antara pendekatan fenomenologis dan pendekatan normatif terhadap masalah moral?
2. Mengapa tidak cukup "ikutilah selalu suara batinmu!"?
3. Mengapa norma "bertindaklah selalu sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakatmu!" harus ditolak?
4. Mengapa metode kita untuk menilai teori-teori normatif disebut "krisis negatif"?
5. Terangkan perbedaan antara teori normatif deontologis dan teleologis!
6. Mengapa teori teleologis membutuhkan teori nilai, sedangkan yang deontologis tidak?
7. Terangkan perbedaan antara teori teleologis egois dan universalis!

XIV. Egoisme etis pada umumnya (hal. 46)

1. Apa yang dimaksud dengan egoisme etis?
2. Apakah egoisme etis selalu harus dinilai secara negatif?
3. Manakah kekurangan prinsipial egoisme etis (perhatikan: kekurangan itu ada pada semua bentuk egoisme etis; jadi kekurangan itu merupakan juga sebab pokok mengapa hedonisme egois dan eudemonisme (baik menurut Aristoteles maupun menurut Thomas Aquinas) tidak mencukup sebagai teori normatif etis)?

XV. Hedonisme egois (hal. 47)

1. Manakah teori nilai yang mendasari hedonisme?
2. Apa yang dimaksud dengan hedonisme egois?
3. Mengapa hedonisme egois tidak memadai?
4. Apa yang dimaksud dengan hedonisme psikologis?
5. Apakah hedonisme psikis dapat diterima?

XVI. Eudemonisme (hal. 48)

1. Manakah yang paling bernilai buat eudemonisme?
2. Apa yang membahagiakan manusia?
3. Apakah perbedaan antara nikmat dan kebahagiaan?
4. Bagaimana menurut Aristoteles kita harus bertindak?
5. Manakah jasa teori Aristoteles itu?
6. Manakah kekurangan teori Aristoteles?

XVII. Etika Situasi (hal. 50 - 52)

1. Mengapa kaum etika situasi berpendapat, bahwa tak ada peraturan umum?
2. Apa betul setiap situasi itu sama sekali unik?
3. Terangkan perbedaan antara:
 - a. norma-norma dasar (abstrak) dan norma-norma kongkrit;
 - b. norma-norma kongkrit umum dan individu!
 Carilah contoh untuk masing-masing norma!
4. Apakah unsur yang betul dalam etika situasi?
5. Di manakah Etika Situasi melebihi-lebihkan?
6. Manakah kelemahan terbesar Etika Situasi?
7. Terangkan pernyataan 13: bagian mana yang mengkritik etika situasi, bagian mana yang membenarkannya? Terangkan dua bagian itu masing-masing.
8. Apakah norma-norma moral umum kongkrit berlaku mutlak?
9. Hanya norma-norma manakah yang mutlak berlaku?
10. Apabila norma-norma umum kongkrit tidak mutlak, apa guna norma2 itu?

XVIII. Teori deontologis peraturan (hal. 53)

1. Apa yang dimaksud dengan teori deontologis peraturan?
2. Manakah kedua kesulitan teori itu?
3. Terangkan perbedaan antara kewajiban yang berlaku prima facie dan yang sungguh-sungguh berlaku.
4. Manakah keberatan prinsipial terhadap teori ini?

XIX. Kant - Etika Nilai (hal. 54,55)

1. Terangkan imperatif kategoris Kant! Mengapa teori ini disebut formalisme?
2. Teori mana yang mau dilawan Kant? Mengapa?
3. Terangkan bagaimana Kant dengan imperatif kategoris mau mengatasi kesulitan pokok teori deontologis peraturan.
4. Mengapa ia tidak berhasil?
5. Mengapa teori Kant juga disebut rigorisme?
6. Apakah bahaya rigorisme itu?
7. Apakah kritik Scheler terhadap Kant?
8. Apakah yang mau ditunjukkan oleh Etika Nilai dengan distingsinya antara "dunia yang ada" dan "nilai yang (tidak "ada" melainkan) berlaku"?

XX. Utilitarisme (hal. 56 - 58)

1. Apa ajaran pokok utilitarisme?
2. Mengapa utilitarisme adalah teori teleologis universalis?
3. Mengapa utilitarisme kelihatan lebih rasional dari teori² deontologis?
4. Apakah kesulitan teoretis utilitarisme yang terbesar (mengapa sulit diterapkan?)
5. Apakah keberatan pokok terhadap (segala bentuk dari) utilitarisme?
6. Terangkan perbedaan antara utilitarisme tindakan dan utilitarisme peraturan!

XXI. Etika Teonom Murni (hal. 58/59)

1. Apakah inti kewajiban moral serta nilai moral menurut teori etika teonom?
2. Sebutlah salah seorang tokoh etika teonom murni!
3. Manakah kedua argument pokok melawan teori ini?
4. Mengapa etika teonom bertentangan dengan rasionalita kesadaran moral?

XXII. Teori Hukum Kodrat (hal. 59/60)

1. Mengapa menurut Thomas kodrat manusia mencerminkan kehendak Allah?
2. Dimana kesamaan antara Thomas dan Aristoteles?
3. Terangkan dua perbedaan pokok antara Thomas dan Aristoteles, yaitu:
 - a. Bahwa menurut Thomas kewajiban moral merupakan kehendak Tuhan, dan
 - b. Tujuan manusia mengatasi dunia ini!
4. Di mana perbedaan antara teori hukum kodrat dan etika teonom murni (dan di mana kesamaannya)?
5. Apakah keunggulan teori Thomas dan apa yang tetap merupakan kekurangannya?

XXIII. Teori dua Kaidah Dasar (hal. 60 - 66)

1. Apa yang dimaksud dengan kaidah sikap-baik?
 2. Apa yang dimaksud dengan kaidah keadilan?
 3. Manakah ciri-ciri yang membenarkan perlakuan tidak sama terhadap dua orang?
 4. Mengapa teori dua kaidah dasar ini mengatasi baik kekurangan teori-teori deontologis maupun kekurangan utilitarisme?
 5. Terangkan perbedaan lingkup kaidah kebaikan dan kaidah keadilan.
 6. Bagaimana kedua kaidah itu harus diperpadukan?
 7. Terangkan dasar ontologis dua kaidah dasar moral.
 8. Apa yang dimaksud dengan sikap realis dan dengan sikap kritis dan mengapa tanggungjawab moral menuntut adanya dua sikap itu?
-